

LAPORAN KINERJA 2022

**DIREKTORAT PENGEMBANGAN
METODOLOGI SENSUS DAN SURVEI**



BADAN PUSAT STATISTIK

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei Badan Pusat Statistik disusun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi direktorat selama tahun 2022 kepada Deputy Bidang Metodologi dan Informasi Statistik. LAKIN ini disusun sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan tindak lanjut TAP MPR RI Nomor: XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip *Clean Government* dan *Good Governance*. Laporan ini memberikan gambaran mengenai pencapaian misi Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei yang sejalan dengan visi BPS dan penyelenggaraan kegiatan sasaran strategis yaitu tersedianya dukungan metodologi sensus dan survei yang tepat guna.

Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan sampai penerbitan laporan ini. Kami juga mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif untuk penyempurnaan laporan pada masa yang akan datang. Semoga laporan ini dapat digunakan sebagai masukan bagi BPS dalam mengevaluasi kegiatan tahun anggaran 2022 dan memberikan rekomendasi pada tahun 2023.

Jakarta, 30 Januari 2023

Direktur
Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei,



Sarpono

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vi
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi.....	2
1.3. Sumber Daya Manusia (SDM) dan Dukungan Anggaran.....	3
1.4. Potensi dan Permasalahan.....	4
1.5. Sistematika Penyajian Laporan.....	6
BAB 2. PERENCANAAN KINERJA.....	7
2.1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis.....	7
2.2. Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024	9
2.3 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022	9
BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA.....	11
3.1. Analisis Capaian Kinerja.....	11
3.2. Prestasi dan Inovasi Direktorat PMSS Tahun 2022	57
3.3. Realisasi dan Efisiensi Anggaran Tahun 2022.....	59
BAB 4. PENUTUP	65
4.1. Kesimpulan	65
4.2. Rencana Tindak Lanjut	65
LAMPIRAN	67

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Direktorat PMSS	3
Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Direktorat PMSS Tahun 2022	9
Tabel 3.1. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 Direktorat PMSS.....	11
Tabel 3.2. Nama Survei Yang Telah Diselesaikan Penyusunan Desain Sampling dan Pengukuran Sampel	14
Tabel 3.3. Daftar Survei Bidang Statistik Sosial, Produksi, dan Distribusi dan Jasa Tahun 2022	17
Tabel 3.4. Capaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Turunan: Persentase master dan peta wilayah kerja statistik yang mutakhir dan berkualitas	28
Tabel 3.5. Jumlah Master Wikerstat yang Dimutakhirkan pada Tahun 2022.....	30
Tabel 3.6. Jenis Pembinaan pada Direktorat PMSS	36
Tabel 3.7. Rekapitulasi Kegiatan pembinaan Statistik terkait Standar Data Statistik	38
Tabel 3.8. Rekapitulasi Kegiatan pembinaan Statistik terkait Klasifikasi Statistik.....	39
Tabel 3.9. Jenis Kerja Sama pada Direktorat PMSS	42
Tabel 3.10. Jumlah KBLI Kemaritiman 2022 Hasil Identifikasi Jumlah Kelompok	47
Tabel 3.11. Pagu dan Realisasi Anggaran Menurut Program Direktorat PMSS Tahun 2022	59
Tabel 3.12. Realisasi Anggaran Menurut Program dan Sasaran Direktorat PMSS Tahun 2022	60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Komposisi SDM Direktorat PMSS Menurut Jenjang Jabatan	4
Gambar 3.1. Persentase Desa Perdesaan dan Perkotaan pada Perka 2020, Hasil Pengolahan PODES 2020 dan PODES 2021	21
Gambar 3.2. Jumlah Desa Perdesaan dan Perkotaan pada Perka 2020, Hasil Pengolahan PODES 2020 dan PODES 2021	22
Gambar 3.3. Jumlah Pengguna Menurut Media yang Digunakan.....	37
Gambar 3.4. Metodologi Penyusunan Cakupan Aktivitas Pariwisata	44
Gambar 3.5. Metodologi Penyusunan Cakupan Aktivitas Ekonomi Kreatif.....	46

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Perbandingan Capaian Kinerja Total Tahun 2022 sampai dengan T-4 (2018)	68
Lampiran 2. Realisasi Kinerja per IKU dari Tahun 2022 sampai dengan Tahun Pertama Periode Renstra (2020).....	71
Lampiran 3. Realisasi Kinerja per IKU Tahun 2022 terhadap Target Renstra Tahun 2022	72
Lampiran 4. Realisasi Kinerja per IKU Tahun 2022 terhadap Target Akhir Renstra 2024.	73
Lampiran 5. Rencana Strategis Tahun 2020-2024.....	74
Lampiran 6. Metadata Indikator Kinerja Utama Direktorat PMSS.....	76
Lampiran 7. Jumlah Sumber Daya Manusia Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei Menurut Jabatan dan Jenjang Pendidikan (Kondisi Desember 2022).....	82

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sesuai Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, dan Perka BPS Nomor 39 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi, Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei (PMSS) mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan statistik dengan cara sensus, survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lain, serta mengumumkan hasilnya secara berkala atau sewaktu-waktu dan terbuka kepada masyarakat baik instansi pemerintah, lembaga swasta, lembaga swadaya masyarakat ataupun perorangan.

Tugas Direktorat PMSS adalah melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penyusunan dan pengembangan desain sensus dan survei, standarisasi statistik, klasifikasi statistik, kerangka sampel, dan pemetaan statistik. Misi Direktorat PMSS yaitu:

- a. Menyediakan metodologi survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas baik dari segi desain sensus dan survei, kerangka sampel, standar data dan klasifikasi statistik, serta pemetaan wilayah kerja statistik untuk mendukung Sistem Statistik Nasional (SSN) dan Satu Data Indonesia (SDI), dan
- b. Membina K/L/D/I dalam bidang metodologi sensus dan survei.

Pelaksanaan misi tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan dari Direktorat PMSS. Tujuan pertama adalah terselenggaranya kegiatan sensus dan survei yang menerapkan metodologi yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data yang berkualitas. Sasaran strategis dari tujuan pertama adalah:

- a. Tersedianya metodologi survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas;
- b. Tersedianya kerangka sampel yang akurat untuk menghasilkan daftar sampel unit analisis yang tepat sasaran;
- c. Tersedianya standar data dan klasifikasi statistik sebagai rujukan bagi produsen data;
- d. Tersedianya master dan peta wilayah kerja statistik yang mutakhir dan berkualitas.

Tujuan kedua adalah mewujudkan kemandirian penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral dalam bidang metodologi sensus dan survei bagi produsen data. Sasaran strategis dari tujuan kedua ini adalah terwujudnya pembinaan dan/atau kerja sama dalam kegiatan statistik (baik dari segi desain sensus dan survei, kerangka sampel, standar data dan klasifikasi statistik, serta pemetaan wilayah kerja statistik).

Guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka pada tahun 2022 Direktorat PMSS melaksanakan berbagai kegiatan yang mengacu pada Program Penyediaan

dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) yang terdiri dari beberapa kegiatan. Kode dan nama kegiatan yang menjadi tanggungjawab Direktorat PMSS adalah [2900]. Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei; [2905]. Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan; dan [2910]. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan. Rata-rata capaian sasaran sebesar 100 persen.

Pelaksanaan program tersebut dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 54 dengan Dalam pelaksanaan program Direktorat PMSS tersebut terdapat beberapa kendala yang mengakibatkan ketidaklancaran melaksanakan kegiatan teknis dan administrasi.

Secara umum kendala tersebut disebabkan oleh:

- a. Terbatasnya waktu untuk peningkatan kapasitas pegawai di bidang metodologi sensus dan survei yang disebabkan adanya tanggung jawab pekerjaan yang padat pada jam kerja. Terbatasnya sarana (laptop, ruang penyimpanan dan pengolahan data, server), prasarana (literatur yang cukup dan sesuai dengan kondisi di Indonesia).
- b. Peningkatan kebutuhan pengembangan metodologi integrasi data, sumber data dan permintaan data SBR sehingga dibutuhkan indikator baru mengenai tersedianya data SBR yang mutakhir dan berkualitas.
- c. Semakin banyaknya permintaan kerja sama dan pembinaan di bidang statistik sektoral belum diimbangi dengan peninjauan beban kerja di unit kerja dan pemahaman tentang peraturan penyelenggaraan pelayanan dan pembinaan statistik sektoral.
- d. Perlakuan blokir anggaran atau Automatic Adjustment (AA) sesuai surat Menteri Keuangan mengakibatkan harus dilakukan penyesuaian desain metodologi yang telah disusun, karena adanya pemotongan anggaran dan pembatasan kegiatan lapangan. Hal itu juga berdampak pada banyaknya penggantian sampel serta penundaan/ pembatalan.

Berbagai upaya yang telah dilakukan Direktorat PMSS untuk mengatasi kendala yang dihadapi yaitu:

- a. Meningkatkan kapasitas SDM melalui berbagai media dan metode pembelajaran, misalnya secara online, forum diskusi, knowledge sharing antar-pegawai di dalam unit kerja serta mengoptimalkan pengaturan beban tugas yang seimbang dari segi volume, waktu, kemampuan SDM, dan jumlah SDM.

- b. Mengusulkan ke pimpinan dan berkoordinasi dengan bagian yang terkait untuk dapat menambahkan indikator baru mengenai tersedianya data SBR yang mutakhir dan berkualitas.
- c. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan unit kerja terkait baik eksternal maupun internal BPS.
- d. Melakukan penyesuaian desain metodologi survei dan mekanisme pelaksanaan survei sesuai perlakuan AA.

Dari hasil evaluasi atas pelaksanaan fungsi dan tugas Direktorat PMSS, dapat disimpulkan bahwa secara umum pencapaian kinerja dan akuntabilitas Direktorat PMSS menunjukkan keberhasilan karena melampaui target pencapaian kinerja. Kesimpulan ini tercermin dari angka rata-rata pencapaian kinerja sasaran sebesar 100 persen. Tingkat pencapaian kinerja tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Direktorat PMSS telah sesuai program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan sekaligus telah mampu memenuhi misi Direktorat PMSS.

BAB 1. PENDAHULUAN

1

1.1. Latar Belakang

Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei (PMSS) merupakan unit kerja Badan Pusat Statistik (BPS) yang mengemban tugas pemerintah untuk pengembangan desain sensus dan survei, standardisasi statistik, klasifikasi statistik, kerangka sampel, dan pemetaan statistik.

Sebagai perwujudan pelaksanaan tata pemerintahan yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR Nomor XI Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, serta UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang hal yang sama telah diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP). Peraturan perundang-undangan tersebut bertujuan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sistem AKIP meliputi Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja. Sistem ini merupakan suatu instrumen untuk menciptakan transparansi instansi pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional, serta dapat menjaga terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Pada awal tahun 2022, Direktorat PMSS menetapkan target kinerja dari setiap indikator tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat PMSS 2022. Realisasi dari target yang telah ditetapkan pada awal tahun tersebut dipantau setiap triwulanan dan dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja interim (pelaporan capaian kinerja triwulanan) dan laporan kinerja tahunan.

Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat PMSS Tahun 2022 merupakan perwujudan kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun 2022. Laporan ini pun akan digunakan sebagai umpan balik dalam memicu perbaikan kinerja Direktorat PMSS di tahun yang akan datang.

1.2. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi

Kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi Direktorat PMSS berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, sebagai berikut:

1. Kedudukan

Direktorat PMSS berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik.

2. Tugas

Tugas Direktorat PMSS menurut Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Bagian Ketiga Pasal 36 adalah melaksanakan penyusunan dan pengembangan desain sensus dan survei, standardisasi statistik, klasifikasi statistik, kerangka sampel, dan pemetaan statistik.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat PMSS menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pengembangan desain sensus dan survei,
- b. Pelaksanaan pengembangan standardisasi dan klasifikasi statistik,
- c. Pelaksanaan pengembangan kerangka sampel, dan
- d. Pelaksanaan pengembangan pemetaan statistik

4. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Direktorat PMSS menurut Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Bagian Ketiga Pasal 38 adalah terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

5. Indikator Kinerja Utama (IKU)

IKU Direktorat PMSS yang menjadi tolok ukur keberhasilan tujuan yang telah ditetapkan, sesuai dengan Perka BPS Nomor 38 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024 dan Perka BPS Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024 yang menjadi implementasi sasaran Direktorat PMSS adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Direktorat PMSS

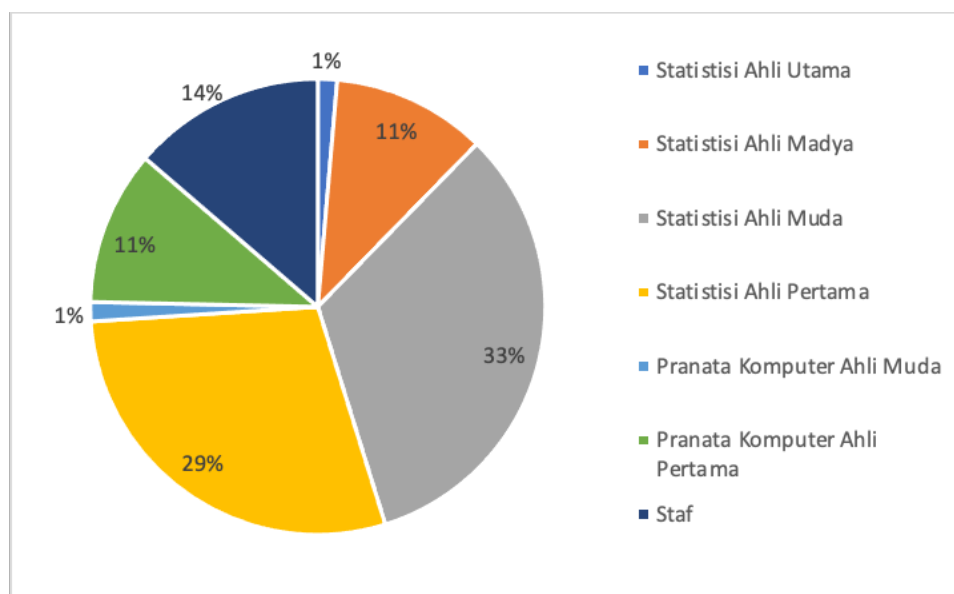
Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Sumber Data	Penjelasan
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
Tersedianya metodologi sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas	Persentase metodologi sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas	Laporan Aktivitas Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei	Jelas
Tersedianya kerangka sampel yang akurat untuk menghasilkan daftar sampel unit analisis yang tepat sasaran	Persentase dokumen kerangka sampel yang akurat untuk menghasilkan daftar sampel unit analisis yang tepat sasaran	Laporan Aktivitas Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei	Jelas
Tersedianya standar data dan klasifikasi statistik sebagai rujukan bagi produsen data	Jumlah publikasi/laporan standar data dan klasifikasi statistik sebagai rujukan bagi produsen data	Laporan Aktivitas Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei	Jelas
Tersedianya master dan peta wilayah kerja statistik yang mutakhir dan berkualitas	Persentase master dan peta wilayah kerja statistik yang mutakhir dan berkualitas	Laporan Aktivitas Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei	Jelas
Terwujudnya pembinaan kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei	Persentase permintaan pembinaan kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei yang dilayani	Laporan Aktivitas Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei	Jelas
Terwujudnya kerja sama kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei	Persentase permintaan kerja sama kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei yang dilayani	Laporan Aktivitas Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei	Jelas

1.3. Sumber Daya Manusia (SDM) dan Dukungan Anggaran

Dalam rangka menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi untuk mewujudkan organisasi yang lebih proporsional, efektif, dan efisien, BPS melalui Perka BPS Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, dan Perka BPS Nomor 39 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi, telah menetapkan susunan organisasi yang baru. Susunan organisasi BPS terdiri dari Kepala, Sekretariat Utama, Kedeputan, Inspektorat Utama, Pusdiklat dan Instansi Vertikal.

Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei (PMSS) berada di bawah Kedeputan Bidang Metodologi dan Informasi Statistik. Struktur organisasi Direktorat PMSS terdiri dari Direktur PMSS membawahi Kelompok Jabatan Fungsional Statistisi dan Pranata Komputer yang secara rinci dijabarkan sebagai berikut.

Pada akhir tahun 2022, SDM Direktorat PMSS seluruhnya berjumlah 74 pegawai. Jumlah pegawai aktif Direktorat PMSS adalah sebanyak 69 pegawai, sedangkan 5 pegawai lainnya sedang melaksanakan Tugas Belajar. Sebagian besar pegawai di Direktorat PMSS memiliki jabatan Statistisi Ahli dengan angka mencapai 74 persen. Pegawai dengan jabatan Pranata Komputer Ahli sebesar 12 persen. Sedangkan 14 persen lainnya merupakan non fungsional/staf. Komposisi SDM menurut jenjang jabatan dapat dilihat pada Gambar 1.1 di bawah ini. Sedangkan untuk komposisi SDM menurut jenjang pendidikan dan jabatan dapat dilihat pada Lampiran 7.



Gambar 1.1. Komposisi SDM Direktorat PMSS Menurut Jenjang Jabatan

1.4. Potensi dan Permasalahan

Dalam perjalanannya mengemban tugas sesuai amanat Perka BPS Nomor 7 Tahun 2020 dan mengacu uraian tugas yang tercantum dalam Perka BPS Nomor 1 Tahun 2009, Direktorat PMSS berupaya memenuhi kebutuhan kegiatan statistik kependudukan, pertanian, dan bidang ekonomi. Namun demikian, Direktorat PMSS terus melakukan pengembangan desain sensus dan survei, klasifikasi dan standardisasi statistik, kerangka sampel, pemetaan statistik dan register usaha. Direktorat PMSS harus dapat memberi wawasan dan melakukan pembinaan terkait metodologi sensus dan survei yang mencakup semua aspek. Selain itu, tugas yang tak kalah penting dan menjadi amanat Direktorat PMSS dan BPS secara keseluruhan adalah pembinaan statistik sektoral di bidang metodologi survei serta sebagai pembina standar data dalam implementasi Satu Data Indonesia (SDI).

Dalam mendukung tugas Deputi Bidang MIS khususnya terkait perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang metodologi, Direktorat PMSS mengembangkan

penyelenggaraan statistik agar mampu memenuhi kebutuhan pengguna data statistik yang akurat dan semakin beragam. Peran Direktorat PMSS dalam implementasi SDI menjadi sangat penting. SDI membutuhkan standardisasi dalam bentuk petunjuk teknis yang baku terkait penyelenggaraan kegiatan statistik baik dalam hal konsep, definisi, metode penyusunan kerangka sampel, dan penarikan sampel.

Potensi yang dimiliki Direktorat PMSS untuk mencapai sasaran yang ditetapkan adalah:

- a. SDM yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pencapaian sasaran.
- b. Pembentukan unit kerja baru yang difokuskan dalam pengembangan *Statistical Business Register* (SBR) yaitu Fungsi Pengembangan Register Usaha
- c. Berkembangnya teknologi informasi berbasis geospasial membuka potensi yang besar dalam pengembangan metodologi sensus dan survei. Penggunaan pengindraan jarak jauh mulai diujicoba dalam pembuatan kerangka geospasial lahan pertanian. Teknologi ini direkomendasikan oleh *Food and Agriculture Organization* (FAO) untuk memproduksi statistik pertanian yang lebih efektif.
- d. Tersedianya sistem aplikasi yang dibangun dan dipelihara oleh Direktorat PMSS.
- e. Peningkatan permintaan pembinaan dan kerja sama kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei.

Pengembangan di bidang metodologi tersebut tidak luput dari beberapa permasalahan yang harus dihadapi, baik yang berakibat pada kegiatan teknis maupun administrasi. Secara umum permasalahan tersebut antara lain:

- a. Terbatasnya sarana (laptop, ruang penyimpanan dan pengolahan data, server), prasarana (literatur yang cukup dan sesuai dengan kondisi di Indonesia).
- b. Terbatasnya waktu untuk peningkatan kapasitas pegawai di bidang metodologi sensus dan survei yang disebabkan adanya tanggung jawab pekerjaan yang padat pada jam kerja.
- c. Semakin banyaknya permintaan kerja sama dan pembinaan di bidang statistik sektoral belum diimbangi dengan peninjauan beban kerja di unit kerja dan pemahaman tentang peraturan penyelenggaraan pelayanan dan pembinaan statistik sektoral.
- d. Peningkatan kebutuhan pengembangan metodologi integrasi data, sumber data dan permintaan data SBR sehingga dibutuhkan unit kerja khusus untuk menangani SBR.

- e. Perlakuan blokir anggaran atau Automatic Adjustment (AA) sesuai surat Menteri Keuangan mengakibatkan harus dilakukan penyesuaian desain metodologi yang telah disusun, karena adanya pemotongan anggaran dan pembatasan kegiatan lapangan. Hal itu juga berdampak pada banyaknya penggantian sampel serta penundaan/ pembatalan survei.

1.5. Sistematika Penyajian Laporan

Mengacu pada Peraturan Kepala BPS Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan SAKIP, Laporan Kinerja Direktorat PMSS Tahun 2022 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I. Pendahuluan, pada bab ini disajikan latar belakang; kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi; sumber daya manusia dan dukungan anggaran; potensi dan permasalahan yang dihadapi Direktorat PMSS; serta sistematika penyajian laporan.
- BAB II. Perencanaan Kinerja, pada bab ini berisi visi, misi, tujuan dan sasaran strategis; Rencana Strategis (Renstra) Direktorat PMSS 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat PMSS Tahun 2022.
- BAB III. Akuntabilitas Kinerja, pada bab ini berisi analisis pencapaian kinerja tahun 2022; perbandingan capaian kinerja total tahun 2022 sampai dengan 2018; realisasi kinerja per IKU dari tahun 2022 sampai dengan tahun pertama periode Renstra (2020); realisasi kinerja per IKU tahun 2022 terhadap target Renstra tahun 2022; Realisasi kinerja per IKU tahun 2022 terhadap target akhir Renstra 2024; analisis program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja; prestasi dan inovasi Satker tahun 2022; dan realisasi dan efisiensi anggaran tahun 2022.
- BAB IV. Penutup, pada bab ini berisi kesimpulan dan rencana tindak lanjut untuk tahun berikutnya.

BAB 2. PERENCANAAN KINERJA

2

2.1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis

2.1.1. Visi Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei

Visi Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei (Direktorat PMSS) adalah “penyedia metodologi sensus dan survei yang andal untuk mendukung Satu Data Indonesia dan penguatan Sistem Statistik Nasional untuk Indonesia maju” untuk mendukung visi Kedeputan Bidang Metodologi dan Informasi Statistik (Dep MIS) yaitu “penyedia metodologi, sistem informasi, dan diseminasi dalam penyediaan data statistik berkualitas untuk Indonesia maju”.

Rumusan visi tersebut merupakan komitmen bersama, mengingat besar dan kompleksnya permasalahan pembangunan statistik yang maju dan mampu menghasilkan *official statistics* yang dibutuhkan masyarakat dan dapat dibandingkan dengan yang dihasilkan oleh *Nasional Statistics Office* (NSO) negara lain dan penyediaan pelayanan prima di bidang statistik serta dukungan infrastruktur dan pengintegrasian sistem statistik. Sehingga, di masa mendatang BPS dapat menjadi rujukan perstatistikan di dunia internasional. Perlu juga digarispawahi pencapaian visi memerlukan kecermatan dan kematangan dalam perencanaan program dan kegiatan tahunan yang fokus pada skala prioritas tujuan organisasi yang harus dicapai. Sehingga, pengukuran kinerja pun harus dapat ditentukan secara tepat agar dapat menjadi evaluasi pencapaian target kinerja.

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Deputi Bidang MIS yang menggambarkan langkah-langkah yang harus dilaksanakan demi pencapaian visi. Misi dari Deputi Bidang MIS tahun 2020–2024 dapat ditetapkan sebagai berikut:

- a. Mengembangkan metodologi survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas, baik dari segi desain sensus dan survei, kerangka sampel, standar data dan klasifikasi statistik serta pemetaan wilayah kerja statistik untuk mendukung Sistem Statistik Nasional (SSN) dan Satu Data Indonesia (SDI);
- b. Membina K/L/D/I untuk metodologi dan pelaksanaan kegiatan statistik; dan
- c. Meningkatkan layanan statistik dan layanan TI untuk mendukung Sistem Statistik Nasional.

2.1.2. Misi Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei

Misi yang ditetapkan Direktorat PMSS menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu:

- a. Menyediakan metodologi survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas baik dari segi desain sensus dan survei, kerangka sampel, standar data dan klasifikasi statistik, serta pemetaan wilayah kerja statistik untuk mendukung Sistem Statistik Nasional (SSN) dan Satu Data Indonesia (SDI), dan
- b. Membina K/L/D/I dalam bidang metodologi sensus dan survei.

2.1.3. Tujuan Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei

Tujuan Direktorat PMSS, seperti yang tercantum pada Renstra Kedepuyan Bidang Metodologi dan Informasi Statistik 2020-2024, adalah:

Tujuan 1: Terselenggaranya kegiatan sensus dan survei yang menerapkan metodologi yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas.

Tujuan 2: Mewujudkan kemandirian penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral dalam bidang metodologi sensus dan survei bagi produsen data.

2.1.4. Sasaran Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei

Sasaran strategis Direktorat PMSS dalam mendukung SSN yang memenuhi standar internasional dan mewujudkan SDI dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Sasaran strategis dari tujuan pertama: "Terselenggaranya kegiatan sensus dan survei yang menerapkan metodologi yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas" adalah:
 1. Tersedianya metodologi survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas;
 2. Tersedianya kerangka sampel yang akurat untuk menghasilkan daftar sampel unit analisis yang tepat sasaran;
 3. Tersedianya standar data dan klasifikasi statistik sebagai rujukan bagi produsen data;
 4. Tersedianya master dan peta wilayah kerja statistik yang mutakhir dan berkualitas;
- b. Sasaran strategis dari tujuan kedua: "Mewujudkan kemandirian penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral dalam bidang metodologi sensus dan survei bagi produsen data", adalah:
 1. Terwujudnya pembinaan kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei;

2. Terwujudnya kerja sama kegiatan statistik dalam metodologi sensus dan survei.

2.2. Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024

Sebagai dasar menyusun rencana kerja tahunan agar pelaksanaan program dan kegiatan BPS menjadi lebih terarah, efektif, dan efisien, Direktorat PMSS mengacu pada Renstra BPS 2020-2024 yang sudah diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang ditetapkan dalam Pembangunan Jangka Panjang (PJP) 2005-2025 dan Pembangunan Jangka Menengah (PJM) 2020-2024. Renstra BPS merujuk pada Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024. Renstra Direktorat PMSS dapat dilihat pada Lampiran 5.

2.3 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022

Pada periode 2022, telah ditetapkan indikator kinerja dan target yang harus dicapai oleh Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei yang menjadi ukuran keberhasilan dalam memenuhi tugas sebagai unit kerja BPS. Pada tabel di bawah ini ditampilkan perjanjian kinerja yang menjadi tanggung jawab Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei.

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Direktorat PMSS Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Tujuan 1. Terselenggaranya kegiatan sensus dan survei yang menerapkan metodologi yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas			
Tersedianya metodologi sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas	Persentase metodologi sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas	Persen	100
Tersedianya kerangka sampel yang akurat untuk menghasilkan daftar sampel unit analisis yang tepat sasaran	Persentase dokumen kerangka sampel yang akurat untuk menghasilkan daftar sampel unit analisis yang tepat sasaran	Persen	100
Tersedianya standar data dan klasifikasi statistik sebagai rujukan bagi produsen data	Jumlah publikasi standar data dan klasifikasi statistik sebagai rujukan bagi produsen data	Publikasi	6
Tersedianya master dan peta wilayah kerja statistik yang mutakhir dan berkualitas	Persentase master dan peta wilayah kerja statistik yang mutakhir dan berkualitas	Persen	100

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
Tujuan 2. Mewujudkan kemandirian penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral dalam bidang metodologi sensus dan survei bagi produsen data.			
Terwujudnya pembinaan kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei	Persentase permintaan pembinaan kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei yang dilayani	Persen	100
Terwujudnya kerja sama kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei	Persentase permintaan kerja sama kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei yang dilayani	Persen	100

BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA

3

Akuntabilitas kinerja Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei merupakan perwujudan kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan mau pun kegagalan pelaksanaan misi Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat PMSS selama satu tahun anggaran 2022 melalui program-program kegiatan diuraikan pada bab ini.

3.1. Analisis Capaian Kinerja

Capaian kinerja 2022 merupakan pencapaian atas pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat PMSS dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis. Pencapaian tersebut diukur melalui indikator-indikator tujuan dan sasaran strategis selama tahun 2022. Konsep, definisi dan metode penghitungan dapat dilihat pada Lampiran 6.

Secara umum, kinerja Direktorat PMSS menunjukkan keberhasilan, yaitu rata-rata pencapaian sasaran sebesar 100 persen selama tahun 2022. Seperti disajikan pada Tabel 3.1, target yang ditetapkan pada semua sasaran strategis dapat tercapai. Dengan demikian, selama kurun waktu satu tahun, sasaran strategis telah berhasil dilaksanakan dengan pencapaian yang baik.

3.1.1. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022

Tabel 3.1. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 Direktorat PMSS

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tujuan 1 : Terselenggaranya kegiatan sensus dan survei yang menerapkan metodologi yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas					
Tersedianya metodologi sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas	Persentase metodologi sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas	Persen	100	100	100,00

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
Tersedianya kerangka sampel yang akurat untuk menghasilkan daftar sampel unit analisis yang tepat sasaran	Persentase dokumen kerangka sampel yang akurat untuk menghasilkan daftar sampel unit analisis yang tepat sasaran	Persen	100	100	100,00
Tersedianya standar data dan klasifikasi statistik sebagai rujukan bagi produsen data	Jumlah publikasi/laporan standar data dan klasifikasi statistik sebagai rujukan bagi produsen data	Publikasi/ Laporan	6	6	100,00
Tersedianya master dan peta wilayah kerja statistik yang mutakhir dan berkualitas	Persentase master dan peta wilayah kerja statistik yang mutakhir dan berkualitas	Persen	100	100	100,00
Tujuan 2: Mewujudkan kemandirian penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral dalam bidang metodologi sensus dan survei bagi produsen data					
Terwujudnya pembinaan kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei	Persentase permintaan pembinaan kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei yang dilayani	Persen	100	100	100,00
Terwujudnya kerja sama kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei	Persentase permintaan kerja sama kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei yang dilayani	Persen	100	100	100,00

Meskipun demikian, di setiap sasaran masih ada beberapa kendala yang dihadapi. Dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, diperlukan strategi untuk mengatasi berbagai kendala yang terjadi. Berikut ini diuraikan permasalahan yang ditemui dan strategi untuk mengatasi masalah pada setiap indikator.

Tujuan 1 : Terselenggaranya kegiatan sensus dan survei yang menerapkan metodologi yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas

Indikator 1: Persentase metodologi sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas

Pencapaian Direktorat PMSS dalam capaian indikator jumlah dokumen desain sampling sensus dan survei yang andal, efektif dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas tidak terlepas dari indikator lain yang saling terkait. Dalam periode 2022, Direktorat PMSS telah menyelesaikan sebanyak 53 dokumen desain *sampling* dan dokumen 65 dokumen pengukuran sampel. Dimana seluruh dokumen yang diselesaikan merupakan desain *sampling* dan pengukuran sampel yang dikerjajakan atas permintaan dari pihak luar Direktorat PMSS, baik itu dari internal BPS (*Subject Matter* BPS) maupun dari eksternal BPS (Kementerian/ Lembaga di luar BPS). Dengan demikian capaian indikator jumlah dokumen desain *sampling* sensus dan survei yang andal, efektif dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas pada tahun 2022 sebesar 100 persen.

Dokumen desain sensus dan survei merupakan naskah desain sensus maupun survei yang disiapkan untuk kegiatan sensus atau survei di bidang statistik sosial, bidang statistik produksi, serta bidang statistik distribusi dan jasa. Isi dalam dokumen desain ini mencakup antara lain jumlah sampel, metode dan prosedur pengambilan sampel, prosedur penghitungan penimbang (*sampling weight*), prosedur penghitungan kesalahan sampling (*sampling error*), dan prosedur pengumpulan data. Sedangkan dokumen pengukuran sampel merupakan dokumen yang berisi hasil penghitungan minimum sampel sesuai dengan kesepakatan antara Direktorat PMSS dan *Subject Matter* penanggungjawab kegiatan sensus atau survei terkait. Prosedur yang biasanya dilakukan dalam penghitungan sampel adalah Direktorat PMSS memberikan beberapa opsi sampel sesuai dengan kebutuhan *Subject Matter*, seperti level estimasi, cakupan kegiatan, dan informasi lainnya. Dari opsi-opsi ini, *Subject Matter* memilih salah satu opsi yang sesuai dengan keterbatasan-keterbatasan yang ada, seperti anggaran, kebutuhan dari pihak eksternal, dan lain-lain.

Capaian sebesar 100 persen ini jika dilihat dari jumlah dokumen yang dihasilkan ada peningkatan dari target jumlah dokumen yang ditetapkan di awal tahun. Desain metodologi yang dihasilkan pada tahun 2022 sebanyak 53 dokumen dari target 49 dokumen. Sedangkan, dokumen pengukuran sampel yang dihasilkan sebanyak 65 dokumen dari target 59 dokumen. Hal ini dikarenakan ada tambahan permintaan rancangan survei pada tahun berjalan yang berasal dari kementerian/lembaga lain. Permintaan desain sampling dari Kementerian/Lembaga lain ini juga merupakan bagian dari pembinaan dan kerjasama kegiatan statistik bidang metodologi sensus dan survei yang merupakan sasaran kinerja dari Direktorat PMSS juga. Kegiatan seperti ini menggunakan anggaran dari

kementerian/lembaga yang bersangkutan dengan mekanisme kerjasama swakelola tipe I. Sebagai pembina statistik sektoral yang menangani bidang metodologi sensus dan survei, tentu saja hal ini menjadi kewajiban di Direktorat PMSS.

Tabel 3.2. Nama Survei Yang Telah Diselesaikan Penyusunan Desain Sampling dan Pengukuran Sampel

Penyusunan Desain Sampling		Pengukuran Sampel	
No	Nama Survei	No	Nama Survei
1.	Susenas Maret 2022	1.	SKKRT 2022 (triwulan 1)
2.	Susenas September 2022	2.	SKKM BPOM 2022
3.	Sakernas Februari 2022	3.	Sakernas Olah Cepat Februari 2022
4.	Sakernas Agustus 2022	4.	Sakernas Olah Cepat Agustus 2022
5.	SPAK 2022	5.	Susenas Maret 2024
6.	SKKRT 2022 (triwulan 1)	6.	Susenas September 2024
7.	Ujicoba Integrasi SSN dan SKKRT 2022	7.	Sakernas Februari 2024
8.	Longform SP2020	8.	Sakernas Agustus 2024
9.	SKKM BPOM 2022	9.	SPAK 2024
10.	Sakernas Olah Cepat Februari 2022	10.	Passenger Exit Survey (PES) 2022
11.	Sakernas Olah Cepat Agustus 2022	11.	Survei Digital Wisatawan Nasional (Outbound) 2022
12.	Susenas 2023	12.	Survei Penyedia Makan/Minum (VREST UMK) 2022
13.	Sakernas 2023	13.	Survei Triwulanan Kegiatan Usaha (STKU) Terintegrasi 2022
14.	SPAK 2023	14.	Survei Pariwisata Lintas Batas 2022
15.	Passenger Exit Survey (PES) 2022	15.	Survei Profil Pasar 2022
16.	Survei Jasa Akomodasi Tahunan (VHTL) - [Sensus] 2022	16.	SKTIR 2023
17.	Survei Daya Tarik Wisata (VDTW) - [Sensus] 2022	17.	PAW 2023
18.	Survei Penyedia Makan/Minum (VREST UMB) [Sensus] 2022	18.	Poldis 2023
19.	Survei Penyedia Makan/Minum (VREST UMK) 2022	19.	Uji Coba VPDN 2023
20.	Survei Karakterik Usaha (BCS) 2022	20.	STKU 2023
21.	Survei K3 2022	21.	Passenger Exit Survey (PES) 2024
22.	Survei Koperasi Simpan Pinjam 2022	22.	Survei Digital Wisatawan Nusantara 2024

Penyusunan Desain Sampling		Pengukuran Sampel	
No	Nama Survei	No	Nama Survei
23.	Survei Perdagangan Antar Wilayah (PAW) 2022	23.	Survei Digital Wisatawan Nasional (Outbound) 2024
24.	Survei Pola Distribusi (Poldis) Perdagangan 2022	24.	Survei Penyedia Makan/Minum (VREST UMK) 2024
25.	SPDT IHPB 2022	25.	Survei Karakterik Usaha (BCS) 2024
26.	Survei Triwulanan Kegiatan Usaha (STKU) Terintegrasi 2022	26.	Survei K3 2024
27.	Survei Biaya Hidup (SBH) Perkotaan Perdesaan 2022	27.	Survei Koperasi Simpan Pinjam 2024
28.	Survei Komoditas Spesifik 2022	28.	Survei Perdagangan Antar Wilayah (PAW) 2024
29.	Ujicoba Survei Pergudangan dan Aktivitas Penunjang Jasa Lainnya 2022	29.	Survei Pola Distribusi (Poldis) Perdagangan 2024
30.	SKTIR 2022	30.	Survei Triwulanan Kegiatan Usaha (STKU) Terintegrasi 2024
31.	Survei Pariwisata Lintas Batas 2022	31.	Survei Pergudangan dan Aktivitas Penunjang Jasa Lainnya 2024
32.	Survei Profil Pasar 2022	32.	Survei Khusus Triwulanan Neraca Produksi (SKTNP) Barang 2024
33.	Survei konstruksi Tahunan 2021 (pelaksanaan 2022)	33.	Survei Khusus Triwulanan Neraca Produksi (SKTNP) Jasa 2024
34.	Survei Komstrat Perkebunan (Tebu dan Lada) 2022	34.	Survei Khusus Neraca Produksi (SKNP) Tahun 2024
35.	SITASI 2022	35.	Survei Khusus Sektor Jasa 2024
36.	Survei Konstruksi triwulanan 2022	36.	Indepth Study SEEA – Biodiversity Tahun 2024
37.	Survei IMK Triwulanan 2022	37.	Survei konstruksi Tahunan 2021 (pelaksanaan 2022)
38.	Survei IMK TAahunan 2022	38.	SITASI 2022
39.	Survei Produktivitas Ternak 2022	39.	Survei Konstruksi triwulanan 2022
40.	GB PES ST2023	40.	Survei IMK Triwulanan 2022
41.	GB 1 ST2023	41.	Survei IMK Tahunan 2022
42.	GB 2 ST2023	42.	Survei Produktivitas Ternak 2022
43.	SDKI 2022	43.	Survei Ubinan 2023
44.	Survei Cadangan Beras Nasional 2022	44.	Survei KSA (IPlan 2024)
45.	Survei Pendengar RRI di Wilayah 3T 2022	45.	Survei Ubinan (IPlan 2024)
46.	Survei Inovasi Sektor Bisnis Tahun 2022	46.	Survei Konstruksi triwulanan (Iplan 2024)

Penyusunan Desain Sampling		Pengukuran Sampel	
No	Nama Survei	No	Nama Survei
47.	Survei Ecommerce 2022	47.	Survei Konstruksi tahunan (Iplan 2024)
48.	SSGI 2022	48.	Survei IMK triwulanan (Iplan 2024)
49.	SPDT NTP 2022 Kab Palalawan	49.	Survei IMK tahunan (Iplan 2024)
50.	SPDT NTP 2022 Kab Bolaang Mongondow Utara	50.	Survei IBS bulanan (IPLAN 2024)
51.	SPAK Banjar 2022	51.	Survei IBS tahunan (IPLAN 2024)
52.	SKAP DKI 2022	52.	Survei URT Bahan Galian (IPLAN 2024)
53.	SPTK Bali 2022	53.	Survei Komstrat Perkebunan (IPLAN 2024)
		54.	SDKI 2022
		55.	Survei Cadangan Beras
		56.	Survei Pendengar RRI di Wilayah 3T
		57.	Survei Inovasi Sektor Bisnis Tahun 2022
		58.	Survei Ecommerce 2022
		59.	Survei Industri Pariwisata 2023
		60.	SSGI 2022
		61.	SPDT NTP 2022 Kab Palalawan
		62.	SPDT NTP 2022 Kab Bolaang Mongondow Utara
		63.	SPAK Banjar 2022
		64.	SKAP DKI 2022
		65.	SPTK BALI 2022

Permasalahan yang terjadi adalah:

1. Terbatasnya sarana (laptop, ruang penyimpanan dan pengolahan data, server), prasarana (literatur yang cukup dan sesuai dengan kondisi di Indonesia).
2. Terbatasnya waktu yang diperlukan untuk pengembangan desain survei. Selain itu, waktu penghitungan ukuran sampel minimum juga terbatas, akibat adanya perubahan jadwal pengisian IPlan tahun anggaran 2024 sehingga seluruh *Subject Matter* mengajukan permintaan penghitungan minimum sampel kegiatan 2024 diwaktu yang bersamaan.
3. Semakin banyaknya permintaan kerja sama dan pembinaan statistik sektoral di bidang metodologi statistik belum diimbangi dengan peninjauan beban kerja di unit kerja dan pemahaman tentang peraturan penyelenggaraan pelayanan dan

pembinaan statistik sektoral, serta kurangnya kesadaran unit kerja terkait lainnya dalam mendukung kelancaran pembinaan sesuai peraturan yang berlaku.

4. Terbatasnya waktu untuk peningkatan kapasitas/kemampuan pegawai di bidang metodologi sensus dan survei yang disebabkan adanya tanggung jawab pekerjaan yang padat pada jam kerja.

Strategi untuk mengatasi masalah:

1. Adanya keterbatasan sarana memaksa pegawai menggunakan laptop pribadi untuk pengayaan di bidang desain sensus dan survei.
2. Pengaturan pembagian tugas kepada SDM disesuaikan dengan beban dan kemampuannya SDM, serta tenggat waktu yang ditentukan.
3. Berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk meningkatkan pemahaman mekanisme permintaan layanan di bidang metodologi survei bagi penyelenggara kegiatan statistik (termasuk bagi *subject matter* di BPS).
4. Pengayaan dan peningkatan kapasitas SDM dilakukan secara *learning by doing* dan juga di luar jam kerja.

Indikator 2: Persentase dokumen kerangka sampel yang akurat untuk menghasilkan daftar sampel unit analisis yang tepat sasaran

Tahun 2022, penyusunan dokumen kerangka sampel survei yang mutakhir diperoleh sebanyak 60 dokumen atau terealisasi 100 persen dari target yang direncanakan sebanyak 56 dokumen. Penyusunan dokumen tersebut meliputi penyusunan kerangka sampel survei bidang statistik sosial, bidang statistik produksi, serta bidang statistik distribusi dan jasa.

Tabel 3.3. Daftar Survei Bidang Statistik Sosial, Produksi, dan Distribusi dan Jasa Tahun 2022

Statistik Sosial	Statistik Produksi	Statistik Distribusi dan Jasa
1. Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2022	1. Survei Komstrat Perkebunan (Tebu dan Lada) 2022	1. Survei Jasa Akomodasi Tahunan (VHTL) 2022
2. Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2022	2. SITASI 2022	2. Survei Daya Tarik Wisata (VDTW) 2022
3. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2022	3. Survei Konstruksi triwulanan 2022	3. Survei Penyedia Makan/Minum (VREST UMB) 2022
4. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) September 2022	4. Survei IMK Triwulanan 2022	4. Survei Penyedia Makan/Minum (VREST UMK) 2022
	5. Survei IMK Tahunan 2022	5. Survei Karakteristik Usaha (BCS) 2022
	6. GB 1 ST2023	
	7. GB 2 ST2023	
	8. SPHPD Provinsi DKI	
	9. SPHAD Provinsi DKI	
	10. SUB-KSA Bulan Maret-April	

Statistik Sosial	Statistik Produksi	Statistik Distribusi dan Jasa
5. Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) 2022	11. SUB-KSA Bulan Mei-Juni	6. Survei K3 2022
6. Survei Khusus Konsumsi Rumah Tangga (SKKRT) 2022 (Triwulan 1)	12. SUB-KSA Bulan Juli-Agustus	7. Survei Koperasi Simpan Pinjam 2022
7. Ujicoba Survei Ekonomi Rumah Tangga Triwulanan (Seruti) 2022	13. SUB-KSA Bulan September-Oktober	8. Survei Perdagangan Antar Wilayah (PAW) 2022
8. Long Form SP2020	14. SUB-KSA Bulan November-Desember	9. Survei Pola Distribusi (Poldis) Perdagangan 2022
9. Ujicoba SDKI 2022	15. SUB-KSA Bulan Januari-Februari	10. Survei Triwulanan Kegiatan Usaha (STKU) Terintegrasi 2022
10. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2022	16. Ujicoba Survei Ekonomi Pertanian	11. Survei Biaya Hidup (SBH) Perkotaan Perdesaan 2022 Triwulan 2
11. Survei Status Gizi Balita (SSGI) 2022	17. GB PES ST2023	12. Survei Biaya Hidup (SBH) Perkotaan Perdesaan 2022 Triwulan 3
12. Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Olah Cepat Februari 2022	18. Survei Cadangan Beras	13. Survei Biaya Hidup (SBH) Perkotaan Perdesaan 2022 Triwulan 4
13. Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Olah Cepat Agustus 2022	19. Survei Pendengar di wilayah 3T	14. Survei Komoditas Spesifik 2022
14. Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK) Kabupaten Badung dan Jembrana	20. Survei Ubinan 2023 Subround 1	15. Survei Khusus Tabungan dan Investasi Rumah Tangga (SKTIR) 2022
15. Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) Kabupaten Banjar, Kalimantan selatan	21. Survei Ubinan 2023 Subround 2	16. Survei Profil Pasar 2022
16. SKAP Provinsi DKI Jakarta	22. Survei Ubinan 2023 Subround 3	17. Survei E-Commerce 2022
17. Pendataan Awal Regsosek 2022 (Penyiapan Daftar Verifikasi Keluarga)		18. SKKM BPOM
18. Pendataan Awal Regsosek 2022 (Penyiapan Sampel Uji Coba PMT)		
19. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023		
20. Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2023		

Kegiatan penyusunan kerangka sampel sudah dilakukan sesuai *timeline* yang ditentukan. Adapun kendala dan tantangan yang dihadapi, antara lain:

1. Proses terkait kerangka sampel dan daftar sampel pada survei bidang statistik sosial mengalami beberapa kendala di antaranya:
 - Karena kebutuhan yang mendesak terjadi perubahan metodologi pada waktu menjelang kegiatan, sehingga perlu disusun ulang tahapan penyiapan sampel mulai dari kerangka sampel dan daftar sampelnya.
 - Masih banyak diterima pengajuan penggantian sampel blok sensus pada wilayah *remote* dengan biaya yang besar dan alokasi anggaran yang tidak mencukupi.
 - Karena padatnya jadwal survei dan beriringan antara survei satu dan lainnya, hasil pemutakhiran pada survei sebelumnya yang harus digunakan untuk survei

berikutnya pada BS yang terpilih kembali menjadi terlambat. Hal ini menyebabkan penyediaan daftar pemutakhiran pada survei selanjutnya terhambat pada BS yang terpilih kembali kegiatan lain.

2. Proses terkait kerangka sampel dan daftar sampel pada survei bidang statistik produksi mengalami beberapa kendala di antaranya:
 - Usulan penggantian sampel melebihi batas waktu pengajuan yang ditetapkan sehingga sampel final untuk beberapa wilayah menjadi mundur.
 - Sebagian wilayah sampel terpilih pada kegiatan Ubinan mengalami terlewat panen karena siklus tanam padi yang lebih singkat, sehingga menyebabkan penggantian/penambahan sampel.
 - Keterlambatan memperoleh data SIMTP dari Subject Matter menyebabkan waktu penyusunan kerangka sampel dan daftar sampel sangat singkat.
 - Alokasi Blok Sensus kurang dari target yang dimiliki daerah, sehingga dilakukan alokasi ulang dan penarikan sampel ulang.
3. Proses terkait kerangka sampel dan daftar sampel pada survei bidang statistik distribusi mengalami beberapa kendala di antaranya:
 - Pada beberapa kegiatan, naskah metodologi dan alokasi dikirim berdekatan dengan waktu menjelang kegiatan lapangan, sehingga waktu untuk penyusunan kerangka sampel dan daftar sampelnya sangat singkat.
 - Pada beberapa kegiatan, terjadi perubahan naskah metodologi dan alokasi, sehingga perlu disusun ulang tahapan penyiapan sampel mulai dari kerangka sampel dan daftar sampelnya.
 - Usulan penggantian sampel dari daerah melebihi batas waktu pengajuan yang ditetapkan.
 - Penyempurnaan aplikasi iframe dalam mempercepat koordinasi penggantian sampel.

Strategi untuk mengatasi masalah/kendala:

1. Strategi terkait penyiapan kerangka sampel, daftar sampel, dan penggantian sampel:
 - Usulan penggantian sampel yang melebihi waktu yang ditentukan tetap diproses untuk memenuhi kecukupan sampel. Namun, ke depannya dilakukan perbaikan kerangka sampel.
 - Melakukan pembahasan dengan tim Biro Perencanaan dan *Subject Matter* perihal pemenuhan anggaran pada kegiatan survei untuk menekan penggantian sampel.
 - Daftar pemutakhiran dikirimkan secara bertahap ke daerah tanpa menunggu lengkap sampel dalam cakupan provinsi/kecamatan/kota diterima.

- Mendiskusikan strategi penyelesaian pengolahan mendatang, perihal hasil pemutakhiran dengan Tim SIS guna memperbaiki ketepatan penerimaan hasil pemutakhiran dari BPS daerah untuk segera diproses kembali dalam mengupdate kerangka sampel dan penyediaan daftar pemutakhiran survei berikutnya.

Indikator 3: Jumlah publikasi/laporan standar data dan klasifikasi statistik sebagai rujukan bagi produsen data

Pada tahun 2022 Fungsi Pengembangan Standardisasi dan Klasifikasi Statistik (PSKS), Direktorat PMSS telah mampu menghasilkan 6 output laporan/publikasi/aktivitas/Perban yaitu Laporan Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia (KBKI) Pertanian ST2023, Laporan Penyusunan Klasifikasi Desa Perkotaan/Perdesaan 2022, Laporan Konsultasi Klasifikasi Statistik 2022, Laporan Penyusunan Ruang Lingkup PDB Maritim 2022, Laporan Penyusunan Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia (KBKI) 2022 dan Laporan Kegiatan Pembinaan. Adapun rincian capaian output tersebut adalah:

1. Laporan KBKI Pertanian 2023

Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia (KBKI) Pertanian ST2023 merupakan klasifikasi terupdate dikhususkan untuk hasil produk pertanian yang mencakup komoditas barang dan jasa dari komoditas yang sudah ditentukan dalam pelaksanaan sensus dan dibandingkan secara internasional. Klasifikasi yang diharapkan menjadi dasar untuk 2 | Laporan KBKI Pertanian ST2023 pengklasifikasian KBKI berikutnya selain hasil produk pertanian. Klasifikasi ini merupakan bridging atau relasi dari komoditas ST2023 dengan Korespondensi KBKI 2015 yang merujuk secara internasional kepada Central Product Classification (CPC) Version 2 yang diterbitkan oleh United Nation Statistics Division (UNSD) dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 yang merujuk kepada International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) Revisi 4.

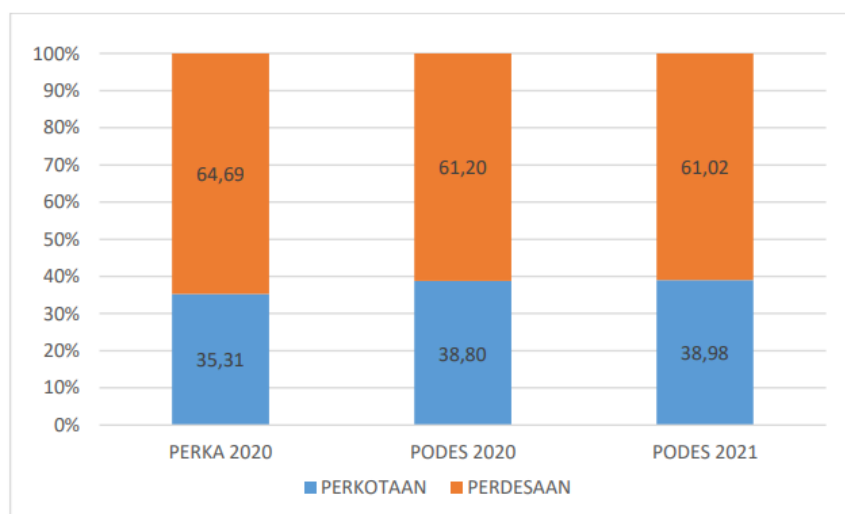
Klasifikasi ini disusun dari komoditas sensus sebelumnya yaitu komoditas ST2013 yang sudah direlasikan dengan kode KBKI 2012 dan KBLI 2015 dan komoditas-komoditas tambahan pada ST2023. Penyusunan KBKI ini dimaksudnya agar mendapatkan kode komoditas ST2023 yang sudah direlasikan dengan KBKI dan KBLI yang terbaru yaitu Korespondensi KBKI 2015 dan KBLI 2020. Klasifikasi yang dikhususkan pertanian ini juga dimaksudkan untuk menyusun dan mentabulasikan berbagai jenis data yang memerlukan uraian mengenai hasil produksi yang rinci dan lengkap yang digunakan untuk statistik pertanian, neraca nasional, dan jasa pertanian. Kegiatan bridging atau relasi kode ini juga

dilakukan untuk memperoleh kode yang tepat saat menentukan kode KBLI dan KBKI pada setiap subsektor pertanian

2. Laporan Penyusunan Klasifikasi Desa Perkotaan/Perdesaan 2022

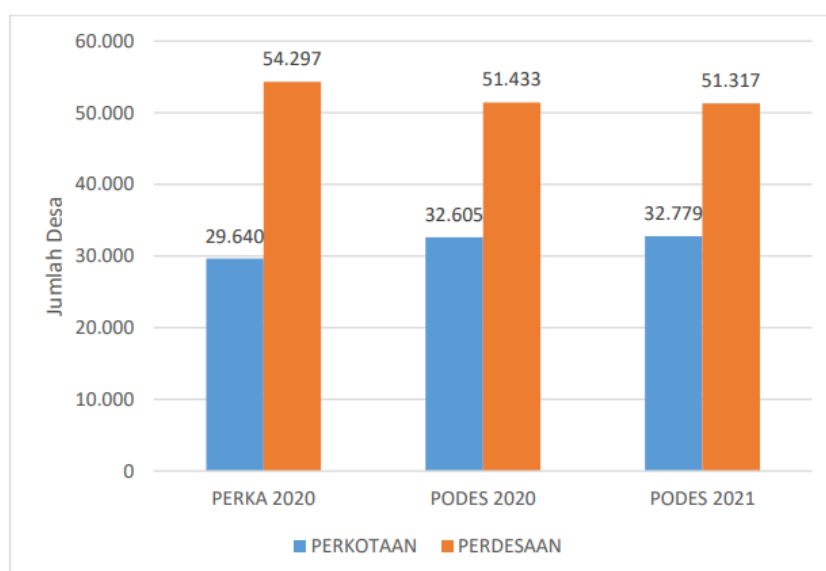
Sejak awal pengembangan klasifikasi desa, Badan Pusat Statistik (BPS) telah menggunakan metode skoring sebagai metode penentuan klasifikasi desa. Kriteria desa perkotaan yang digunakan di Indonesia telah mengalami beberapa kali penyempurnaan, sesuai dengan perkembangan pembangunan wilayah. BPS telah melakukan penyempurnaan kriteria desa perkotaan sebanyak lima kali, yakni berturut-turut pada tahun 1961, 1971, 1980, 2000 dan terakhir pada tahun 2020. Tahun 1990 dan 2010 tidak dilakukan penyempurnaan kriteria desa perkotaan, sehingga kriteria desa perkotaan yang digunakan adalah kriteria desa perkotaan 2000 yang dipertajam. Kriteria penentu desa perkotaan pada dasarnya terdiri dari 3 (tiga) komponen utama yaitu kepadatan penduduk (KPD), persentase rumah tangga pertanian (RTP) dan akses fasilitas umum (AFU). Pada tahun 2010 Klasifikasi Desa Perkotaan dan Perdesaan mulai dituangkan dalam bentuk Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No.37 tahun 2010 tentang klasifikasi perkotaan dan perdesaan di Indonesia, kemudian di revisi dan 4 Laporan Penyusunan Klasifikasi Desa Perkotaan/Perdesaan 2022 dimutakhirkan dengan Perka BPS No. 120 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Desa Perkotaan Dan Perdesaan di Indonesia Tahun 2020.

Pada tahun 2022, disusun Laporan Klasifikasi Penyusunan Klasifikasi Desa Perkotaan/Perdesaan dilakukan perbandingan hasil klasifikasi desa kota antara Perka 2020, hasil pengolahan dengan menggunakan data PODES 2020 dan PODES 2021 untuk melihat volatilitas dan reliabilitas dari metode pengklasifikasian desa perkotaan dan perdesaan yang digunakan dalam Perka BPS Nomor 120 Tahun 2020.



Gambar 3.1. Persentase Desa Perdesaan dan Perkotaan pada Perka 2020, Hasil Pengolahan PODES 2020 dan PODES 2021

Gambar 3.1 menunjukkan bahwa terjadi tren peningkatan persentase desa perkotaan dari tahun ke tahun. Perka 2020 yang didasarkan pada data PODES 2019 menunjukkan bahwa sebesar 35,31% dari total desa merupakan desa perkotaan dan sisanya sebesar 64,69% berstatus perkotaan. Persentase desa perkotaan meningkat cukup signifikan pada hasil pengolahan menggunakan data PODES 2020. Peningkatan yang terjadi lebih dari 3% dari persentase desa di Perka 2020 menjadi 38,80%. Peningkatan yang cukup signifikan ini menunjukkan bahwa terdapat perubahan yang cukup kentara antara hasil Perka 2020 dengan hasil pengolahan data PODES 2020. Di sisi lain, peningkatan persentase desa perkotaan hasil pengolahan data PODES 2020 dan 2021 hanya mengalami sedikit peningkatan yaitu sekitar 0,2%.



Gambar 3.2. Jumlah Desa Perdesaan dan Perkotaan pada Perka 2020, Hasil Pengolahan PODES 2020 dan PODES 2021

Gambar 3.2 menunjukkan jumlah desa yang mengalami perubahan klasifikasi dari desa yang berstatus perdesaan ke perkotaan. Jumlah desa perkotaan mengalami kenaikan dari 29.640 di Perka 2020 menjadi 32.605 di hasil pengolahan PODES 2020 dan 32.779 di hasil pengolahan PODES 2021. Simultan dengan hal tersebut, jumlah desa perdesaan mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Secara umum memang sudah bisa diprediksi bahwa terjadi kecenderungan perubahan dari desa yang berstatus perdesaan untuk berubah menjadi berstatus perkotaan karena perkembangan dan kemajuan. Namun, perubahan yang cukup drastis dari jumlah desa perdesaan hasil Perka 2020 ke hasil

pengolahan PODES perlu menjadi catatan dan evaluasi. Sebagai contoh, terdapat selisih 3000 desa perkotaan pada Perka 2020 dan hasil PODES 2020.

3. Laporan Konsultasi Klasifikasi Statistik 2022

Laporan Konsultasi Klasifikasi Statistik 2022 merupakan kumpulan dokumentasi laporan konsultasi klasifikasi statistik. Laporan tersebut disusun berdasarkan pengumpulan laporan konsultasi klasifikasi statistik yang dilakukan pada Fungsi PSKS dalam rangka dokumentasi laporan untuk pengembangan klasifikasi di masa yang akan datang. Bentuk media konsultasi dapat melalui:

1. Sistem Informasi Layanan Statistik (SILASTIK)
2. Kunjungan langsung ke Fungsi PSKS;
3. Telepon ke Fungsi PSKS; dan
4. Media lainnya, seperti *Email*, *WhatsApp* (WA), surat dan lainnya.

Kegiatan konsultasi klasifikasi statistik menggambarkan kebutuhan kode klasifikasi statistik dari pengguna. Pengguna menggunakan media yang telah disediakan untuk mengkonfirmasi kode yang tepat atau bertanya mengenai kode klasifikasi yang menjadi kebutuhannya. Pengguna media konsultasi yang menanyakan kode klasifikasi statistik ke Fungsi PSKS selama tahun 2022 sudah melayani 100 persen pengguna, baik melalui SILASTIK (123 pengguna), kunjungan langsung (4 pengguna) dan telepon (23 pengguna) ke Fungsi PSKS maupun melalui media lain seperti *email*, WA atau surat (13 pengguna). Sehingga total pengguna media.

4. Laporan Penyusunan Ruang Lingkup PDB Maritim 2022

Kekayaan sumber daya kelautan Indonesia tersebut harus digunakan secara optimal untuk mencapai kesejahteraan bersama. Oleh karena itu pemerintah, dalam hal ini Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi memegang peranan penting dalam optimalisasi potensi sumber daya kelautan Indonesia. Untuk mengetahui kontribusi sektor maritim, diperlukan pengukuran output sektor maritim. Untuk itu perlu disusun Produk Domestik Bruto (PDB) Maritim. Sebelum penyusunan PDB Maritim, diperlukan klasifikasi cluster apa saja yang masuk ke dalam sektor maritim. Untuk menyediakan kerangka klasifikasi aktivitas maritim yang komprehensif disusunlah Laporan Penyusunan Ruang Lingkup PDB Kemaritiman 2022 agar dapat digunakan untuk penyeragaman pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis data statistik maritim.

Dalam penyusunan Ruang Lingkup PDB Kemaritiman 2022 mengacu pada referensi Internasional yakni *Ocean Accounting for Sustainable Development (version 0,9,1 October 2020) Consultation Draft.*, Dari referensi tersebut, kemudian dilakukan bridging dengan

KBLI 2020. KBLI 2020 mengklasifikasikan seluruh aktivitas/kegiatan ekonomi ke dalam beberapa cluster yang dibedakan berdasarkan pendekatan kegiatan yang menekankan pada proses dari kegiatan Laporan Penyusunan Ruang Lingkup PDB Kemaritiman 2022 3 ekonomi dalam menciptakan barang/ jasa, dan pendekatan fungsi yang lebih melihat pada fungsi pelaku ekonomi dalam menciptakan barang/jasa. Proses penyusunan ruang lingkup PDB Kemaritiman 2022 dilakukan berdasarkan identifikasi lapangan usaha yang menghasilkan output barang dan jasa sektor maritim dalam KBLI 2020, yang mendapatkan input dari sektor maritim dan yang berada di pesisir. Sebelum dilakukan identifikasi lapangan usahanya, terlebih dahulu dilakukan penyiapan dan review kembali frame awal yang sudah dibangun di tahun 2016, yakni KBLI Kemaritiman 2016. Selanjutnya, agar frame yang akan dibangun untuk penyusunan ruang lingkup PDB Laporan Penyusunan Ruang Lingkup PDB Kemaritiman 2022 9 Kemaritiman 2022 memiliki sifat keterbandingan secara internasional, maka referensi yang digunakan adalah referensi internasional.

Berikut tahapan kegiatan dalam penyelesaian Laporan Penyusunan Ruang Lingkup PDB Kemaritiman 2022:

- a. Identifikasi awal klasifikasi aktivitas maritim. Dalam tahap ini dilakukan review Kembali cakupan KBLI Kemaritiman 2016.
- b. Review dan Knowledge Sharing referensi internasional Ocean Accounts oleh tim BPS.
- c. Review dan Knowledge Sharing referensi internasional lainnya (OECD) oleh tim Prospera.
- d. Penetapan referensi Ocean Accounts sebagai referensi utama yang digunakan dalam penyusunan ruang lingkup PDB Kemaritiman 2021.
- e. Bridging ISIC Codes (Frame Ocean Accounts) dengan KBLI 2020.
- f. Bridging KBLI 2009 (Frame KBLI Kemaritiman 2016) dengan KBLI 2015 dan KBLI 2020.
- g. Mapping cakupan Frame Ocean Accounts dan Frame KBLI Kemaritiman 2016.
- h. Identifikasi hasil mapping cakupan oleh masing-masing tim teknis (Tim Metodologi/ PSKS; Tim Neraca dan Tim Kemenko Marves).
- i. Menentukan ruang lingkup PDB Kemaritiman 2021 ke dalam KBLI 2020. Tahap ini mengidentifikasi 5 digit KBLI 2020 berdasarkan hasil cakupan yang telah ditentukan.
- j. Menyelenggarakan rapat internal Subdit PSKS. Rapat ini mendiskusikan hasil eksplorasi dan ruang lingkup PDB kemaritiman 2021 beserta 5 digit KBLI nya secara internal subdit.

- k. Menyelenggarakan rapat konsolidasi hasil identifikasi cakupan oleh masing-masing tim teknis.
- l. Menyelenggarakan Focus Group Discussion pembahasan cakupan ruang lingkup PDB Kemaritiman 2021 dengan mengundang K/L terkait. Dalam Focus Group Discussion tersebut K/L terkait menyampaikan definisi, cakupan dan proses bisnis masing-masing kode KBLI yang sebelumnya telah diidentifikasi tim teknis. Selain itu, dilakukan juga proses konfirmasi ketersediaan data di masing-masing K/L.
- m. Melanjutkan proses konfirmasi ketersediaan data di K/L pada awal tahun 2022 sampai bulan April 2022
- n. Menyelenggarakan rapat internal Fungsi PSKS untuk membahas draft Laporan Penyusunan Ruang Lingkup KBLI Kemaritiman 2021 dan difinalisasi Ruang Lingkup KBLI Kemaritiman 2022.
- o. Penyelesaian Laporan Penyusunan Ruang Lingkup PDB Kemaritiman 2022.

Tujuan penyusunan Laporan Penyusunan Ruang Lingkup PDB Kemaritiman 2022 adalah sebagai dasar penyusunan Produk Domestik Bruto (PDB) Maritim yang akan menjadi dasar perencanaan dan evaluasi program kerja pemerintah yang berkaitan dengan pembangunan maritim nasional.

5. Laporan Penyusunan Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia (KBKI) 2022

Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia (KBKI) merupakan klasifikasi komoditas yang baku dan lengkap mencakup semua barang dan jasa di Indonesia. Klasifikasi komoditas ini berfungsi sebagai standar nasional untuk pembangunan dan pentabulasian semua jenis data yang memerlukan detail produk, termasuk statistik produksi industri, perdagangan komoditas dalam dan luar negeri, perdagangan jasa internasional, neraca pembayaran, statistik konsumsi dan harga serta data lain yang digunakan dalam neraca nasional. Klasifikasi ini menyediakan kerangka kerja untuk perbandingan internasional dan memperkenalkan harmonisasi berbagai jenis statistik berkaitan dengan barang dan jasa. KBKI pertama dibuat pada tahun 2010, yaitu KBKI 2010 yang menggambarkan komoditas barang dan jasa dalam 5 digit kode. Kemudian pada tahun 2012 dibuat KBKI 2012 Barang yang mencakup komoditas barang dalam 10 digit kode dan pada tahun 2013 Jasa dibuat KBKI 2013 yang mencakup komoditas jasa dalam 5 digit kode. Pada Tahun 2015 BPS mengeluarkan KBKI 2015 Barang dan Jasa. Penyusunan KBKI diatas berdasarkan Central Product Classification Version 2.0 yang dirilis pada tahun 2008.

Pada Tahun 2015 the United Nations Statistics Division (UNSD) merilis CPC Version 2.1 (ST/ESA/STAT/SER.M/77/Version.2.1) dalam bentuk White Cover Publication, pre-

edited text subject to official editing. Untuk itu BPS dalam hal ini DPMSS melakukan proses update KBKI 2015 dengan CPC Version 2.1 ini. CPC Version 2.1 adalah hasil tinjauan terjadwal dari struktur dan detail CPC untuk memastikan klasifikasi relevansi untuk menggambarkan produk saat ini dalam perekonomian. Perubahan dalam Version ini sebagian besar hasil kajian lebih lanjut terhadap produk pertanian (termasuk perikanan, kehutanan dan pertanian input), output dari industri jasa yang dipilih, produk energi dan penyesuaian yang diperlukan untuk mencerminkan perubahan yang dibuat dalam Harmonized Commodity Description and Coding System.

Tujuan utama CPC Version 2.1 adalah untuk mengklasifikasikan barang dan jasa yang hasil produksi dalam perekonomian. Produksi ini dicatat dalam neraca nasional suatu negara dan dapat diukur dan dianalisis menggunakan System of National Accounts (SNA). CPC Version 2.1 berguna dalam mempelajari transaksi barang dan jasa secara detail. Dapat juga digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan daftar barang dan jasa untuk tujuan tertentu, seperti statistik harga survei, survei statistik pariwisata atau survei terkait teknologi, informasi dan komunikasi (TIK), dengan keunggulan LAPORAN KBKI 2022 5 DIGIT vii utamanya adalah memenuhi kriteria standar internasional. Hal ini memiliki penerimaan yang luas dan memfasilitasi pemeliharaan sistem kategori produk, baik yang berkaitan dengan karakter dan definisi. Oleh karena itu dapat berfungsi sebagai kerangka kerja untuk perbandingan internasional.

Penggunaan dan jenis statistik yang berbeda paling baik disajikan dengan menyajikan statistik dalam hal tingkat agregasi yang berbeda. Dengan demikian, mungkin perlu atau diinginkan untuk menggunakan tingkat KBKI yang berbeda detail untuk tujuan yang berbeda. Misalnya, untuk tujuan akuntansi nasional, mungkin diperlukan untuk mengklasifikasikan data pada tingkat detail yang berbeda dari yang diperlukan untuk statistik industri tujuan. Demikian pula, data produksi yang diperoleh dari perusahaan biasanya dapat diklasifikasikan jauh lebih detail daripada data pembentukan modal yang diperoleh dari sistem pelaporan administrasi. Struktur hierarki KBKI menyediakan kerangka kerja untuk klasifikasi data yang sebanding pada tingkat detail yang berbeda.

6. Laporan Kegiatan Pembinaan 2022 Bidang Standar Data dan Klasifikasi Statistik

Laporan Kegiatan Pembinaan Statistik Bidang Standar Data dan Klasifikasi Statistik Tahun 2022 merupakan dokumentasi kegiatan pembinaan statistik bidang standar data dan klasifikasi statistik tahun 2022. Pembinaan Statistik merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei. Kegiatan Pembinaan

Statistik merupakan salah satu tugas Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai Pembina Data dalam rangka mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI).

Selain mengatur tentang prinsip Satu Data Indonesia, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 dalam Pasal 13 ayat 2 yang berbunyi: “Untuk data statistik tingkat pusat, Pembina Data Statistik tingkat pusat yaitu badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik”. Pada tahun 2022 kegiatan pembinaan di Fungsi Standardisasi dan Klasifikasi Statistik mencakup pembinaan terkait standar data statistik dan klasifikasi statistik. Bentuk kegiatan pembinaan statistik terkait klasifikasi dan standar data statistik lebih efektif dilakukan dengan pendampingan secara melekat ke masing-masing institusi agar lebih fokus dan terarah. Pembinaan statistik terkait klasifikasi dan standar data statistik masih mengandalkan inisiatif dari eksternal Badan Pusat Statistik, perlu dukungan dari sisi anggaran maupun kebijakan terkait peningkatan pembinaan statistik agar inisiatif dari Badan Pusat Statistik meningkat.

Permasalahan/kendala yang dihadapi dalam aktivitas penyusunan standardisasi dan klasifikasi statistik :

1. Sumber Daya Manusia

- Terbatasnya SDM teknologi informasi yang dapat mengembangkan dan membangun sistem berbasis *website*/aplikasi guna mengakomodasi kebutuhan dari penerapan atas petunjuk teknis standar data, klasifikasi statistik agar berjalan efektif dan efisien; saat ini masih mengandalkan pengembang sistem (*developer*) Direktorat PMSS yang tidak hanya mengerjakan sistem tetapi juga mengerjakan proses bisnis rutin terkait pengembangan konten/pemeliharaan standar data dan klasifikasi statistik. Hal ini ke depan dapat menjadi kendala karena volume pekerjaan yang terus meningkat dengan ditetapkannya Peraturan Badan terkait klasifikasi dan standar data statistik yang melibatkan lintas unit kerja di BPS dan lintas unit kerja antar K/L.

2. Koordinasi dan Sosialisasi

- Kurangnya pemahaman baik internal BPS sendiri maupun di Kementerian/Lembaga dalam penerapan petunjuk teknis standar data statistik dan klasifikasi.

3. Volume/ beban pekerjaan

- Tindak lanjut implementasi Peraturan Badan Pusat Statistik terkait Standar Data Statistik dan Klasifikasi memerlukan pembinaan/ layanan yang semakin meluas dan meningkat kepada internal/eksternal BPS dalam kaitannya dengan Satu Data Indonesia.

Strategi untuk mengatasi masalah/kendala dalam aktivitas penyusunan standardisasi dan klasifikasi statistik :

1. Meningkatkan pembinaan berupa sosialisasi dan koordinasi SDSN sampai pada tingkat wilayah/daerah sebagai salah satu instrumen Satu Data Indonesia.
2. Penentuan unit yang bertanggung jawab terhadap klasifikasi statistik di BPS Daerah belum secara formal ditentukan, terlebih lagi pada masa transisi di era jabatan fungsional.

Indikator 4: Persentase master dan peta wilayah kerja statistik yang mutakhir dan berkualitas

Dalam penyelenggaraan kegiatan statistik dibutuhkan master dan peta wilayah kerja statistik (wilkerstat) yang *up to date* dan berkualitas. Untuk memperoleh tujuan tersebut, setiap tahun Direktorat PMSS melakukan pemutakhiran master dan peta wilayah kerja statistik dengan memanfaatkan teknologi mulai dari proses *updating* wilkerstat sampai dengan pengiriman hasil peta yang dimutakhirkan. Capaian indikator dalam bentuk persentase master dan peta wilayah kerja statistik yang mutakhir dan berkualitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4. Capaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Turunan: Persentase master dan peta wilayah kerja statistik yang mutakhir dan berkualitas

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Turunan IKU	Penanggung Jawab	Capaian Indikator Turunan	Capaian IKU
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
Tersedianya master dan peta wilayah kerja statistik yang mutakhir dan berkualitas	Persentase master wilkerstat yang diupdate	Fungsi Pengembangan Kerangka Sampel	Persentase master wilkerstat yang diupdate terhadap pemutakhiran wilkerstat yang dilaporkan = 100 %	100 %
	Persentase peta wilkerstat yang diupdate	Fungsi Pengembangan Pemetaan Statistik	Persentase peta yang diupdate terhadap master wilkerstat yang diupdate = 100 %	

1. Pemutakhiran Master Wilayah Kerja Statistik (Wilkerstat)

Pemutakhiran master wilkerstat merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan dalam rangka menyediakan kerangka wilayah kerja bagi kegiatan sensus/survei dari perencanaan, pelaksanaan sampai diseminasi kegiatan. Cakupan pemutakhiran master Wilkerstat tahun 2022 meliputi pemutakhiran master wilayah administrasi, master blok sensus dan master SLS.

a. Pemutakhiran Master File Desa (MFD) dan Master Blok Sensus (MBS)

Pemutakhiran master wilkerstat meliputi pemutakhiran pada wilayah administrasi (MFD), blok sensus (MBS), dan master SLS (MS) dilakukan oleh BPS Provinsi/Kabupaten/Kota melalui Aplikasi *Frame Register System* (FRS) MFDOnline. Pemutakhiran ini dilaksanakan secara rutin sepanjang tahun dan menghasilkan 2 (dua) kali master *up to date* dalam setiap tahunnya, yaitu master periode Januari-Juni (Semester 1) dan Juli-Desember (Semester 2). Menjelang akhir periode pemutakhiran, BPS Provinsi/Kabupaten/Kota melaporkan Berita Acara Perubahan Wilayah beserta dokumen-dokumen pendukungnya Admin Pusat melalui FRS MFDOnline.

Dari laporan perubahan wilayah yang disampaikan BPS Provinsi/ Kabupaten/ Kota, pada tahun 2022 tidak terdapat perubahan wilayah pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Perubahan wilayah administrasi masih terjadi di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan. Perubahan pada BS2010 difokuskan pada perubahan yang diakibatkan oleh perubahan pada tingkat desa-nya, seperti adanya penggabungan/pemekaran desa. Perubahan BS2020 terdiri dari pemutakhiran muatan BS, serta pelaporan perubahan BS akibat perubahan wilayah administrasi di atasnya. Sedangkan pemutakhiran SLS di tahun 2022, dijabarkan sebagai berikut:

- Semester 1, pemutakhiran SLS diintegrasikan dengan kegiatan Pemutakhiran Kerangka Geospasial dan Muatan Wilkerstat ST2023, bulan Maret 2022 dan diolah sampai dengan Juni 2022.
- Semester 2, pemutakhiran SLS diintegrasikan dengan kegiatan Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) 2022, bulan September – Oktober 2022 dan diolah sampai dengan Desember 2022.

Dalam rangka menjaga kualitas kegiatan pemutakhiran master wilkerstat, dilaksanakan supervisi atau pengawasan. Pengawasan dilakukan berjenjang, yaitu Tim BPS Pusat ke beberapa BPS Provinsi, BPS Provinsi ke BPS Kabupaten/Kota di bawahnya, serta BPS Kabupaten/Kota ke Kecamatan di bawahnya. Wilayah yang disupervisi memperhatikan kasus perubahan yang terjadi serta potensi kendala yang dihadapi pada wilayah tersebut.

Adapun capaian kegiatan pemutakhiran master wilkerstat pada 2022 ini adalah 100 persen. Hal ini ditunjukkan dengan laporan daerah yang diterima, dimana Kabupaten/Kota dan Provinsi mengirimkan Berita Acara pemutakhiran. Sinkronisasi antara FRS MFSONline dengan aplikasi lain yang digunakan untuk melakukan pemutakhiran SLS, yaitu Sistem Pengolahan Muatan Wilkerstat (SiPW) dan PSLs-Regsosek.

Berikut adalah Master Wilkerstat Tahun 2022 yang dimutakhirkan melalui FRS MFDOonline:

Tabel 3.5. Jumlah Master Wilkerstat yang Dimutakhirkan pada Tahun 2022

Master Wilkerstat	Jumlah Master Wilkerstat	
	2022 Semester 1	2022 Semester 2
Provinsi	34	34
Kabupaten/Kota	514	514
Kecamatan	7.281	7.283
Desa/Kelurahan	84.058	84.118
Blok Sensus	853.921	853.965
SLS/Non SLS	1.340.213	1.340.406

b. Kajian Prosedur Pemutakhiran Satuan Lingkungan Setempat (SLS)

Untuk kebutuhan kegiatan sensus/survei ke depan Badan Pusat Statistik (BPS) mulai melakukan pengelolaan terhadap Satuan Lingkungan Setempat (SLS), yaitu suatu wilayah di bawah desa/kelurahan yang memiliki ketua dan pengurus yang telah operasional dan keberadaannya diakui oleh pemerintah. SLS ini di antaranya RT, RT, Dusun, Jorong, dan lain sebagainya, yang dapat berbeda-beda di berbagai wilayah. Pada tahun 2019, BPS telah melakukan kegiatan pemetaan dan pemutakhiran muatan SLS terkecil. Output kegiatan ini adalah master SLS beserta informasi muatannya yang digunakan sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan lapangan Sensus Penduduk 2020. Master SLS ini pertama kali dimanfaatkan untuk penyiapan basis data penduduk SP2020 yang data dasarnya bersumber dari registrasi penduduk Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Basis data dasar tersebut kemudian dilakukan verifikasi lapangan saat pelaksanaan sensus penduduk 2020

yang menghasilkan data penduduk kondisi ter-update menurut status de jure dan status domisili.

SLS diharapkan dapat digunakan sebagai *enumeration area* (EA) alternatif dari penggunaan blok sensus (BS) yang selama ini BPS gunakan. SLS memiliki kelebihan bahwa penggunaannya di masyarakat telah umum dikenal, meskipun perubahannya relatif lebih dinamis dan cepat. Untuk dapat digunakan sebagai EA dan master pada kerangka sampel, SLS tentunya harus selalu dimonitor perubahannya dari waktu ke waktu. Maka di tahun 2023 direncanakan kegiatan pemutakhiran EA SLS yang dilakukan melalui 2 (dua) tahapan, yaitu tahap identifikasi perubahan SLS melalui kegiatan Podes, dan tahap pemutakhiran SLS sebagai tindak lanjut hasil identifikasi perubahan SLS oleh petugas pemutakhiran SLS. Hasil lapangan pemutakhiran SLS dalam bentuk informasi perubahan SLS dan peta pemutakhiran SLS, selanjutnya diolah di BPS Kabupaten/Kota untuk memperoleh master SLS beserta muatannya, dan peta SLS yang up to date dan bersesuaian.

Untuk mendukung kegiatan tersebut, di tahap persiapan tahun 2022 disusun pedoman teknis lapangan pemutakhiran EA SLS dan pedoman pengolahan pemutakhiran EA SLS.

Masalah/kendala yang dihadapi dari kegiatan di atas adalah sebagai berikut:

1. Kendala terkait pengelolaan dan pemutakhiran master wilkerstat
 - FRS MFDOnline diakses secara masif untuk melakukan pemutakhiran master SLS hasil pemutakhiran kerangka geospasial dan muatan wilkerstat ST2023, pada menjelang akhir kegiatan entri sistem menjadi sulit diakses;
 - Sinkronisasi antar sistem (FRS, GS dan SiPW) masih belum sempurna sehingga masih perlu proses yang dilakukan di luar sistem.
2. Kendala terkait penyusunan prosedur pemutakhiran SLS
 - Prosedur pemutakhiran EA SLS yang disusun belum dapat diujicoba-kan karena kegiatan uji coba dibatalkan.

Strategi untuk mengatasi masalah/kendala:

1. Terhadap kendala akses MFDOnline strategi yang dilakukan adalah:
 - Melaksanakan kegiatan *capacity building* metodologi secara berkala kepada penanggung jawab MFDOnline;
 - Menerapkan mitigasi pengiriman laporan perubahan wilayah melalui *email*. Admin pusat melakukan pemeriksaan laporan tersebut dan memperbaikinya pada MFDOnline;
 - Merancang perbaikan pada aplikasi FRS MFDOnline untuk dikerjakan pada periode selanjutnya;

- Strategi sementara parallel dengan perbaikan pada system yang dilakukan adalah mengerjakan proses sinkronisasi data dilakukan di luar system, dan hasilnya diinput kembali ke dalam system yang terkait;
2. Strategi terkait penyusunan prosedur pemutakhiran SLS antara lain:
 - Melakukan diskusi dengan BPS Provinsi/Kabupaten/Kota yang diintegrasikan dalam kegiatan Supervisi Pemutakhiran Master Wilkerstat, dalam rangka menggali potensi pemutakhiran master SLS di daerah serta menggali masukan dari daerah.

2. Pemutakhiran Peta Wilayah Kerja Statistik

a. Pemutakhiran Kerangka Geospasial dan Peta Wilayah Kerja Statistik ST2023

Tahun 2022 diselenggarakan Pemutakhiran Kerangka Geospasial dan Muatan Wilkerstat ST2023 yang bertujuan untuk memutakhirkan kerangka geospasial pertanian, yaitu berupa area/lahan yang memiliki potensi pertanian; serta memutakhirkan peta dan muatan wilkerstat sampai level satuan lingkungan setempat terkecil (SLS) dan blok sensus (BS), sebagai dasar untuk pelaksanaan ST2023.

Kegiatan Pemutakhiran Kerangka Geospasial dan Muatan Wilkerstat ST2023 memiliki dua tahapan, yaitu kegiatan lapangan dan kegiatan pengolahan. Pada tahap pertama, kegiatan lapangan dilakukan pemutakhiran peta SLS; pemutakhiran muatan SLS dan BS; geotagging batas SLS/non SLS yang mengalami perubahan batas; geotagging di dalam semua wilayah SLS/non SLS; *geotagging* di lokasi sampel tutupan lahan; dan *geotagging* infrastruktur pertanian. Kegiatan lapangan telah dilaksanakan pada tanggal 1 – 31 Maret 2022. Selanjutnya, hasil kegiatan lapangan akan digunakan sebagai bahan pengolahan. Kegiatan pengolahan terdiri dari pengolahan muatan wilkerstat; pengolahan peta wilkerstat; dan pengolahan menggunakan *machine learning* (oleh BPS Pusat).

Hasil dari seluruh kegiatan pengolahan peta wilkerstat ini adalah mendapatkan peta digital wilkerstat dan peta digital titik bangunan yang mutakhir, serta mendapatkan layout peta yang akan digunakan pada kegiatan ST2023. Hasil pemutakhiran diupload ke *Geospatial System* yang merupakan sarana untuk mengatur/manajemen peta digital (*upload*, *download*, dan pengecekan peta). Jumlah pemutakhiran peta digital desa/kelurahan dapat diketahui dari *Geospatial System*.

Masalah/kendala yang dihadapi adalah:

1. Terdapat wilayah yang sulit dijangkau oleh petugas lapangan.
2. Handphone petugas di bawah spesifikasi yang dibutuhkan.
3. Kekurangan sumber daya dalam pengolahan peta.

4. Dalam proses pengolahan, arsitektur sistem kurang optimal sementara jumlah grid yang akan diproses sangat banyak.

Strategi yang diambil untuk mengatasi kendala adalah:

1. Membuat mitigasi untuk wilayah yang sulit dijangkau maupun sulit sinyal.
2. Developer aplikasi melakukan troubleshoot pada beragam merek handphone untuk memudahkan.
3. Mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam pengolahan peta.
4. Pengerjaan proses *running* model dan klasifikasi dilakukan secara bergantian dan terjadwal. Selain itu, arsitektur sistem lebih ditingkatkan sehingga pengolahan data bisa berhasil dilakukan.

b. Penyediaan Kerangka Geospasial untuk Kerangka Sample Area (KSA)

KSA didefinisikan sebagai teknik pendekatan penyampelan yang menggunakan area lahan sebagai unit enumerasi. Sistem ini berbasis teknologi Sistem Informasi Geografi (SIG), pengideraan jauh, teknologi informasi, dan statistika yang saat ini sedang diimplementasikan di Indonesia untuk perolehan data dan informasi pertanian tanaman pangan. Pendekatan KSA diharapkan mampu menjawab penyediaan data dan informasi yang akurat dan tepat waktu untuk mendukung perencanaan Program Ketahanan Pangan Nasional. Kegiatan yang dilakukan adalah pembuatan modul penggantian sampel KSA pada sistem KSAPro.

c. Pembuatan Peraturan tentang Kode dan Nama Wilkerstat

Di tahun 2022, Peraturan BPS tentang kode dan nama wilayah kerja statistik diterbitkan dalam bentuk Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik tentang kode dan nama wilayah kerja statistik kondisi tahun 2021 semester 1. Untuk kondisi tahun 2021 semester 2 sudah selesai disusun, namun masih menunggu pengesahannya dari Kemenkum HAM.

Laporan peta desa yang mutakhir kondisi 2021 semester 1 dituangkan dalam Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 164 Tahun 2022 tentang Perubahan Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik. Dalam Keputusan tersebut, jumlah kabupaten kota, kecamatan dan desa kondisi 2021 Semester 1 adalah sejumlah 416 kabupaten, 98 kota, 7.252 kecamatan dan 83.820 desa. Masalah dan kendala yang dihadapi dan strategi mengatasinya dijelaskan sebagai berikut.

Masalah/kendala yang dihadapi adalah:

1. Proses pengesahan Peraturan memerlukan waktu yang lama.

2. Kapasitas file yang besar menyebabkan dokumen Peraturan dapat di-*upload* ke dalam sistem namun tidak bisa diakses oleh Bagian Hukum dan Organisasi.

Strategi untuk mengatasi kendala adalah:

1. Menunggu proses yang dilakukan Biro Humas dan Hukum sesuai prosedur yang telah ditentukan.
2. Pengiriman file dokumen dilakukan juga melalui email.

d. Analisis Geospasial Hasil SP2020

Integrasi antara data penduduk hasil SP2020 dengan peta wilkerstat dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan analisis. Dalam kerangka GSBPM, tahapan ini termasuk kedalam fase *Analyze* pada *Post-Enumeration*. Menyediakan informasi statistik dalam konteks geografis, memungkinkan untuk *stakeholder* dapat lebih memahami dalam menganalisis hubungan data secara spasial sehingga strategi kebijakan akan lebih terarah.

Pemanfaatan integrasi data geospasial dan hasil SP2020 yang dilakukan pada tahun 2022 antara lain:

- Membuat peta estimasi sebaran penduduk pada grid 1 km x 1 km.
- Membuat peta Derajat Urbanisasi (*Degree of Urbanization*).
- Perhitungan indikator *Sustainable Development Goals* (SDGs) menggunakan kedua *output* tersebut.

e. Pembuatan Peta Tematik dan Penyediaan Data

Pembuatan peta tematik dan penyediaan data yang disusun untuk publikasi atau penyiapan peta untuk kegiatan survei pada tahun 2022 mencakup:

1. Peta Tematik Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) 2022

Peta tematik IKK dibuat berdasarkan hasil Survei Harga Kemahalan Konstruksi tahun 2022 dengan Kota Makassar berindeks 100 sebagai kota acuan/penimbang. Peta tematik IKK yang disusun terdiri dari:

- Peta Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi menurut Kabupaten/Kota 2022
- Peta Indeks Kemahalan Konstruksi Indonesia menurut Provinsi 2022
- Peta Indeks Kemahalan Konstruksi Indonesia menurut Kabupaten/Kota 2022

Peta tematik IKK yang dihasilkan berjumlah 36 peta yang terdiri dari 34 peta tematik IKK Provinsi menurut Kabupaten/Kota, 1 peta tematik IKK Indonesia menurut Provinsi, dan 1 peta tematik Indonesia menurut Kabupaten/Kota.

2. Penyediaan peta untuk keperluan berbagai survei dari Kementerian/Lembaga, antara lain sebagai berikut:
 - Penyediaan peta Blok Sensus (Peta WB) untuk kegiatan Survei Cadangan Beras Nasional Mei 2022 dari Dirjen Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian. Peta yang disediakan terdiri dari 800 sampel peta WB untuk konsumen, 600 peta BS sampel untuk produsen, dan 5.374 peta BS untuk pelaku usaha.
 - Penyediaan peta Blok Sensus (Peta WB) untuk kegiatan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Mei 2022, Kementerian Kesehatan RI yang terdiri dari 17.757 peta BS sampel perkotaan dan 16.743 peta BS sampel perdesaan.
 - Penyediaan peta Blok Sensus (Peta WB) dan peta desa (Peta WA) untuk kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Juni 2022, Kementerian Kesehatan RI yang terdiri dari 1822 peta WB dan 1817 peta WA.
 - Penyediaan peta Blok Sensus (Peta WB) untuk kegiatan Survei Kinerja Akuntabilitas Program (SKAP) September 2022, BKKBN yang terdiri dari 112 peta WB.

f. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Geospasial dan Master Frame

1. Pengembangan WebGIS

Pengembangan yang telah dilakukan pada 2022 ini:

- Penambahan *service* kemiskinan Anak
- Penambahan *service* analisis SP2020

2. Pengembangan aplikasi wilkerstat

Pengembangan yang telah dilakukan pada 2022 ini:

- Penambahan poligon tutupan lahan
- *Upgrade* target SDK Aplikasi Android Wilkerstat
- Penyempurnaan validasi nama *project*
- Penambahan *project* VREST
- Penyempurnaan edit *landmark*
- Penyempurnaan *Error Handler*
- Penyempurnaan *SSO Login* dan Eksternal *login*
- Perbaikan *layout Record* Lokasi
- Implementasi *CameraX*

3. Pengembangan *Geospatial System*

Pengembangan yang telah dilakukan pada 2022 ini:

- Penyempurnaan *service* agar bisa di akses publik.
- Penarikan data master dari FRS/MFD *Online*.
- Monitoring absensi penyerahan peta hasil kegiatan-kegiatan sensus/survei di BPS.
- Penyempurnaan Menu Rekap Peta Digital.
- Penyempurnaan Menu Peta Digital.
- Penyempurnaan Fitur *Landmark*.
- *Download* master (*user* super admin dan pusat).

4. Geoportal API

Tujuan 2: Mewujudkan kemandirian penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral dalam bidang metodologi sensus dan survei bagi produsen data

Indikator 5: Persentase permintaan pembinaan kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei yang dilayani

Indikator ini menggambarkan pembinaan dalam bidang metodologi sensus dan survei yang telah dilakukan oleh Direktorat PMSS baik dari aspek desain sensus dan survei, kerangka sampel, standar data dan klasifikasi statistik, serta pemetaan. Pembinaan yang dilakukan dapat berupa konsultasi dan pemberian rekomendasi metodologi (*technical assistance*). Pada 2021, seluruh permintaan pembinaan berhasil dilayani oleh Direktorat PMSS. Secara umum, jenis pembinaan kegiatan statistik yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6. Jenis Pembinaan pada Direktorat PMSS

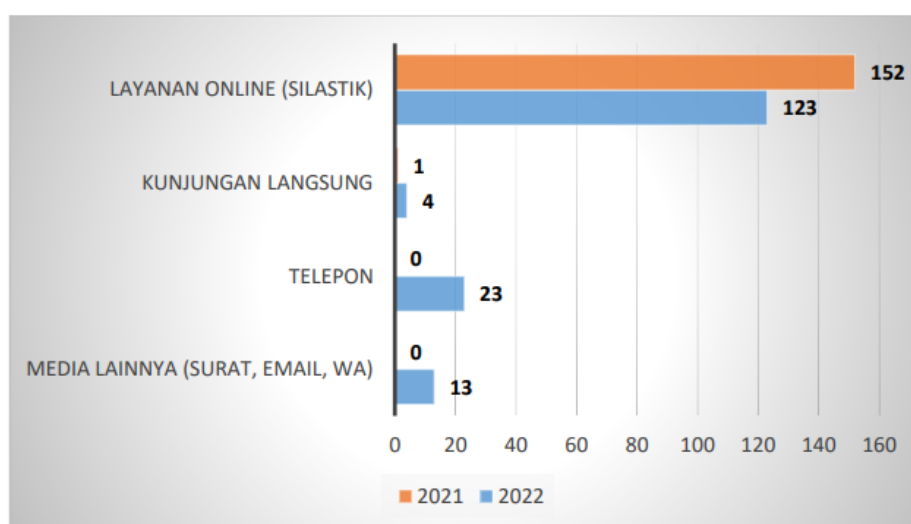
No	Jenis Pembinaan	Jumlah
1	Pembinaan dan konsultasi standardisasi dan klasifikasi statistik	261
2	Pembinaan dan konsultasi metodologi survei sektoral	41
	Jumlah	302

1. Pembinaan Standar Data dan Klasifikasi Statistik 2022

Jumlah pembinaan kegiatan statistik terkait klasifikasi statistik dapat diketahui melalui jumlah permintaan konsultasi klasifikasi

Kementrian/lembaga/institusi/perorangan dan jumlah undangan narasumber dari Kementerian/Lembaga.

Konsultasi Klasifikasi Statistik disediakan untuk berbagai kalangan pengguna klasifikasi statistik baik pegawai internal BPS untuk mendukung pelaksanaan kegiatan sensus/survei BPS, maupun pihak eksternal yaitu institusi pemerintah, perusahaan, dan perorangan. Laporan konsultasi klasifikasi statistik disusun dalam rangka pendokumentasian kegiatan konsultasi dan penyesuaian dengan perubahan perekonomian, khususnya kode klasifikasi yang sering berhubungan dengan kebutuhan pengguna, karena banyaknya pertanyaan-pertanyaan mengenai klasifikasi statistik yang belum secara eksplisit terjawab dari deskripsi publikasi klasifikasi statistik baik KBLI, KBJI, KBKI maupun Klasifikasi lainnya seperti Klasifikasi Urban Rural. Hal ini dapat digunakan sebagai masukan dalam perbaikan/revisi klasifikasi. Di samping itu, laporan menjadi acuan bagi tim konsultasi ke depan dalam memberikan rekomendasi kode klasifikasi statistik yang tepat sehingga meningkatkan kualitas data yang berhubungan dengan penggunaan klasifikasi. Jumlah konsultasi pada periode penyusunan laporan tahun 2022 (Oktober 2021 s.d. September 2022) mencapai 100 persen konsultasi klasifikasi statistik dengan total 163 pengguna konsultasi, baik melalui SILASTIK (123 pengguna), kunjungan langsung (4 pengguna), telepon (23 pengguna), dan lainnya, yaitu email, WA, maupun surat ke Direktorat PMSS (13 pengguna).



Gambar 3.3. Jumlah Pengguna Menurut Media yang Digunakan

Sedangkan untuk kegiatan pembinaan/ pelatihan standardisasi dan klasifikasi statistik kepada Kementerian/ Lembaga terkait klasifikasi statistik sebagai narasumber yang melibatkan peserta dalam grup/ sekelompok orang/ unit kerja instansi berdasarkan

permintaan/ undangan pada tahun 2022 terhitung 98 kegiatan, yang direkap kegiatan pembinaan terkait Standar Data Statistik sebesar 38 kali dan pembinaan terkait Klasifikasi Statistik sebesar 60 kali.

Tabel 3.7. Rekapitulasi Kegiatan pembinaan Statistik terkait Standar Data Statistik

No	Kementerian/Lembaga	Frekuensi
1	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	4
2	Kementerian Pertanian	4
3	Kementrian Hukum dan HAM	2
4	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1
5	Kementerian Perindustrian	2
6	Kementerian Dalam Negeri	1
7	Ombudsman	2
8	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	3
9	Kementerian Kelautan dan Perikanan	8
10	Kementerian Koperasi dan UKM	1
11	Badan Pengawas Obat dan Makanan	1
12	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Invesasi <ul style="list-style-type: none"> • Bappenas • Kementerian Kelautan dan Perikanan • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Kementrian Perindustrian • Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral • Kementerian Perhubungan • Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif • Kementerian Pertahanan 	2

No	Kementerian/Lembaga	Frekuensi
	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi • Kementerian Perdagangan • Kementerian Peekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat • Kementerian Komunikasi dan Informatika • Badan Riset dan inovasi Nasional • Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika • Badan Informasi Geospasial 	
13	Komnas HAM	1
14	Kementerian Ketenagakerjaan	4
15	Basarnas	1
16	Kementerian Perdagangan	1
	JUMLAH	38

Tabel 3.8. Rekapitulasi Kegiatan pembinaan Statistik terkait Klasifikasi Statistik

No.	Kementerian/Lembaga	Frekuensi
1	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	15
2	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP)	15
3	Kementerian Dalam Negeri	2
4	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	6
5	Kementerian Investasi/ BKPM	7
6	Kementerian Perindustrian	2
7	Kementerian Komunikasi dan Informatika	1
8	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	1

No.	Kementerian/Lembaga	Frekuensi
9	Kementerian Perhubungan	1
10	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1
11	Bank Indonesia	1
12	Kementerian Ketenagakerjaan	2
13	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	3
14	Kementerian Kesehatan	1
15	Badan Nasional Sertifikasi Profesi	1
16	Badan Informasi Geospasial	1
	Jumlah	60

Jadi total pembinaan dan konsultasi standardisasi dan klasifikasi statistik sebesar 261 kegiatan dengan 163 konsultasi dan 98 kegiatan lainnya sebagai narasumber.

Permasalahan/kendala yang dihadapi:

- Sistem Pembakuan (SIBAKU) masih perlu pengembangan untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada pengguna, seperti penambahan fitur baru yang menunjang fitur utama.
- Sibaku Online sudah dapat diakses secara publik sebagai salah satu cara pencarian klasifikasi statistik, namun hanya sampai 3 bulan dari Januari sd. Maret 2022.

Strategi yang diambil untuk mengatasi masalah/kendala:

- Mengoptimalkan pengalihan konsultasi melalui daring menggunakan Sistem Informasi Layanan Statistik (Silastik).
- Menyempurnakan transisi ke aplikasi yang terbaru dan menambah fungsi-fungsi dari sistem lama untuk mengoptimalkan sistem yang baru.

2. Pembinaan dan Konsultasi Metodologi Survei Sektor

Pada tahun 2022, Direktorat PMSS melakukan pembinaan penyusunan metodologi survei sektoral, di antaranya:

1. Pada penghitungan sampel Tahapan Verifikasi Faktual Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum.
2. Pada Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) Tahun 2022 yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional.

3. Pada Pendataan Lengkap KUMKM Tahun 2022 yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia.
4. Pada Pendataan Usaha Garam Tahun 2022 yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.
5. Pada Survei Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLIK) yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
6. Pada Survei Kesadaran dan Kepuasan Masyarakat terhadap Obat dan Makanan Tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.
7. Pada Survei Pendengar RRI di Wilayah 3T (Terpencil, Terluar, Terdepan) Tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
8. Pada Survei Status Gizi Indonesia yang dilaksanakan oleh Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan.
9. Pada Survei Cadangan Beras Nasional Tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian.
10. Pada kegiatan diseminasi hasil penghitungan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) Tahun 2022.
11. Pada pengukuran Kapabilitas Rehabilitasi Tahun 2022 yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional
12. Pada Workshop Pengolahan Data dan Penyusunan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat di lingkungan Pusadtin Kemendikbudristek yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi
13. Pada Rapat Penyusunan Instrumen Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan di Kecamatan yang Efektif yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Sebagian besar pembinaan yang dilakukan terhadap K/L bertujuan untuk menyusun kerangka sampel sesuai kaidah survei serta dapat melakukan pemilihan sampel yang menggunakan *probability sampling* sehingga kualitas statistik sektoral yang dihasilkan menjadi baik. Tantangan yang dihadapi adalah dibutuhkan penyusunan petunjuk teknis yang baku dalam hal penyusunan kerangka sampel dan pemilihan sampel sesuai dengan standar penyelenggaraan kegiatan statistik yang baik.

Indikator 6: Persentase permintaan kerja sama kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei yang dilayani

Indikator ini menggambarkan permintaan kerja sama dalam bidang metodologi sensus dan survei yang telah dilakukan oleh Direktorat PMSS baik dari aspek desain sensus dan survei, kerangka sampel, standar data dan klasifikasi statistik, pemetaan serta *statistical business register* (SBR). Kerja sama yang dilakukan dapat berupa penyusunan metodologi sampling survei, cakupan klasifikasi, dan standar data statistik yang akan digunakan. Jumlah kerja sama berdasarkan jenis dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.9. Jenis Kerja Sama pada Direktorat PMSS

No	Jenis Kerja Sama	Jumlah
1	Kerja sama penyusunan metodologi survei sektoral	5
2	Kerja sama klasifikasi statistik	3
3	Kerja sama register usaha	1
	Jumlah	9

Kerja Sama Penyusunan Metodologi Survei Sektoral

Secara umum, kerja sama yang dilakukan mencakup penyusunan desain sampling dan kerangka sampel, penyediaan daftar sampel blok sensus, penyediaan peta wilayah blok sensus, penyediaan daftar listing rumah tangga pada blok sensus terpilih, penghitungan penimbang sampling, dan konsultasi terkait metode sampling.

Selama tahun 2022, Direktorat PMSS melakukan 5 (lima) kerjasama penyusunan metodologi sampling survei sektoral sebagai berikut:

1. Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dilaksanakan oleh Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan-Kementerian Kesehatan. Ruang lingkup kerja sama meliputi penyusunan desain sampling dan kerangka sampel; penyediaan daftar sampel blok sensus; penyediaan daftar pemutakhiran rumah tangga pada blok sensus terpilih; penyediaan peta wilayah blok sensus; penghitungan penimbang sampling; penyusunan rekomendasi statistik, standar data, standar metadata dan referensi data; dan konsultasi terkait metode sampling.
2. Survei Kesadaran dan Kepuasan Masyarakat Terhadap Obat dan Makanan (SKKM) yang dilaksanakan oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ruang lingkup kerja sama meliputi penyusunan desain sampling

dan kerangka sampel; penyediaan daftar sampel blok sensus dan daftar sampel blok sensus dan sampel rumah tangga pengganti; penghitungan penimbang sampling; dan konsultasi terkait metode sampling.

3. Survei Pendengar RRI di Wilayah 3T (Terpencil, Terluar, Terdepan) yang dilaksanakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Ruang lingkup kerja sama meliputi penyusunan desain sampling dan kerangka sampel; penyediaan daftar sampel dan peta; penyediaan daftar pemutakhiran keluarga/rumah tangga pada blok sensus terpilih; penghitungan penimbang; dan konsultasi terkait metode sampling.
4. Survei Cadangan Beras Nasional yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian. Ruang lingkup kerja sama meliputi penyusunan desain sampling dan kerangka sampel; penyediaan daftar sampel blok sensus dan daftar sampel blok sensus dan sampel rumah tangga pengganti; penghitungan penimbang sampling; dan konsultasi terkait metode sampling.
5. Survei Demografi Kesehatan Indonesia yang dilaksanakan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional. Ruang lingkup kerja sama meliputi penyusunan desain sampling dan kerangka sampel; penyediaan daftar sampel blok sensus dan peta; penyusunan daftar pemutakhiran; dan konsultasi terkait metode sampling.

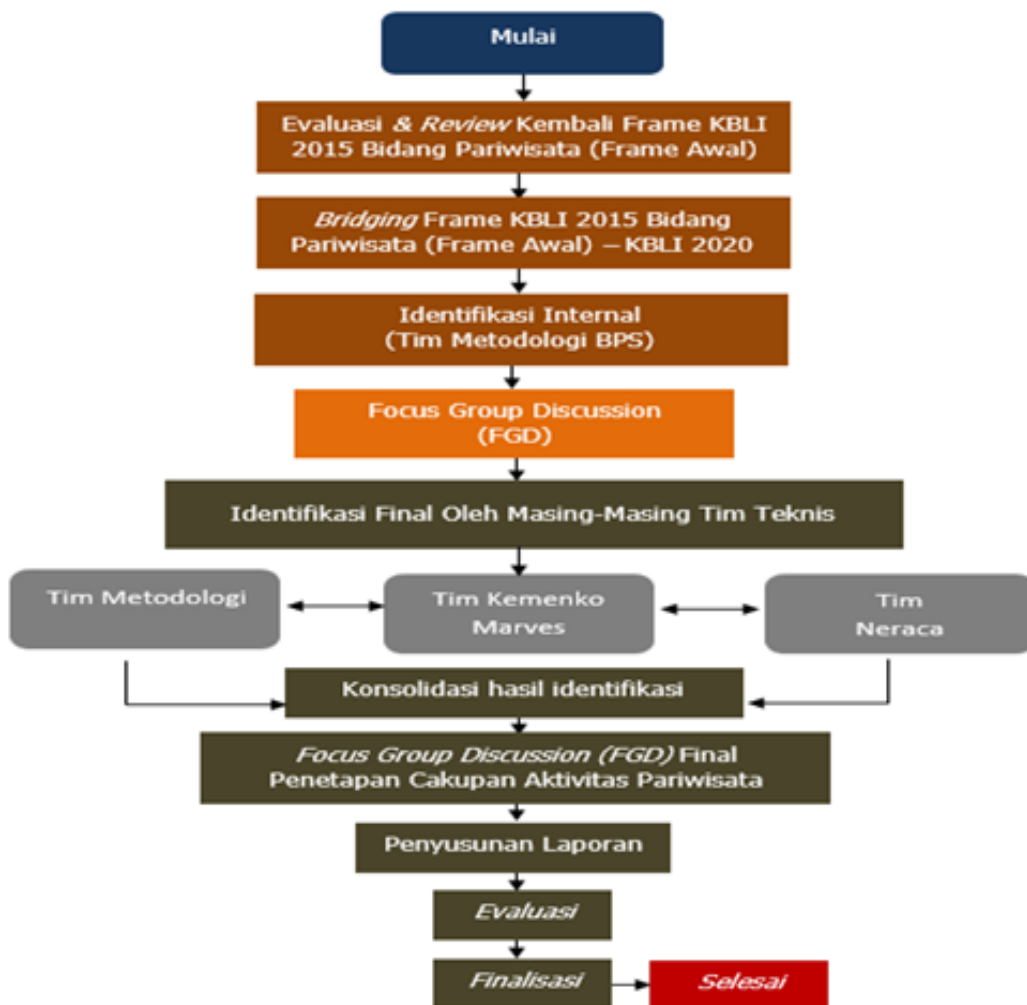
Kerja Sama Klasifikasi Statistik

Selama tahun 2022, kerja sama klasifikasi statistik yang dilakukan sebagai berikut:

1. **Penyusunan Cakupan Kegiatan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2022 dalam KBLI 2020**

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, maka cakupan aktivitas pariwisata yang tertuang dalam KBLI 2015 Bidang Pariwisata dianggap memiliki keterbatasan dan tidak relevan lagi. Keterbatasan utamanya adalah KBLI yang digunakan belum memakai Peraturan Badan Pusat Statistik yang terbaru. Oleh karena itu pada tahun 2022 ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menginisiasi Kerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melakukan penyempurnaan cakupan dan pemetaan industri pariwisata dengan mengacu pada KBLI 2020 (Per BPS No. 2/2020) untuk menyediakan satu set kerangka klasifikasi kegiatan ekonomi pariwisata yang komprehensif.

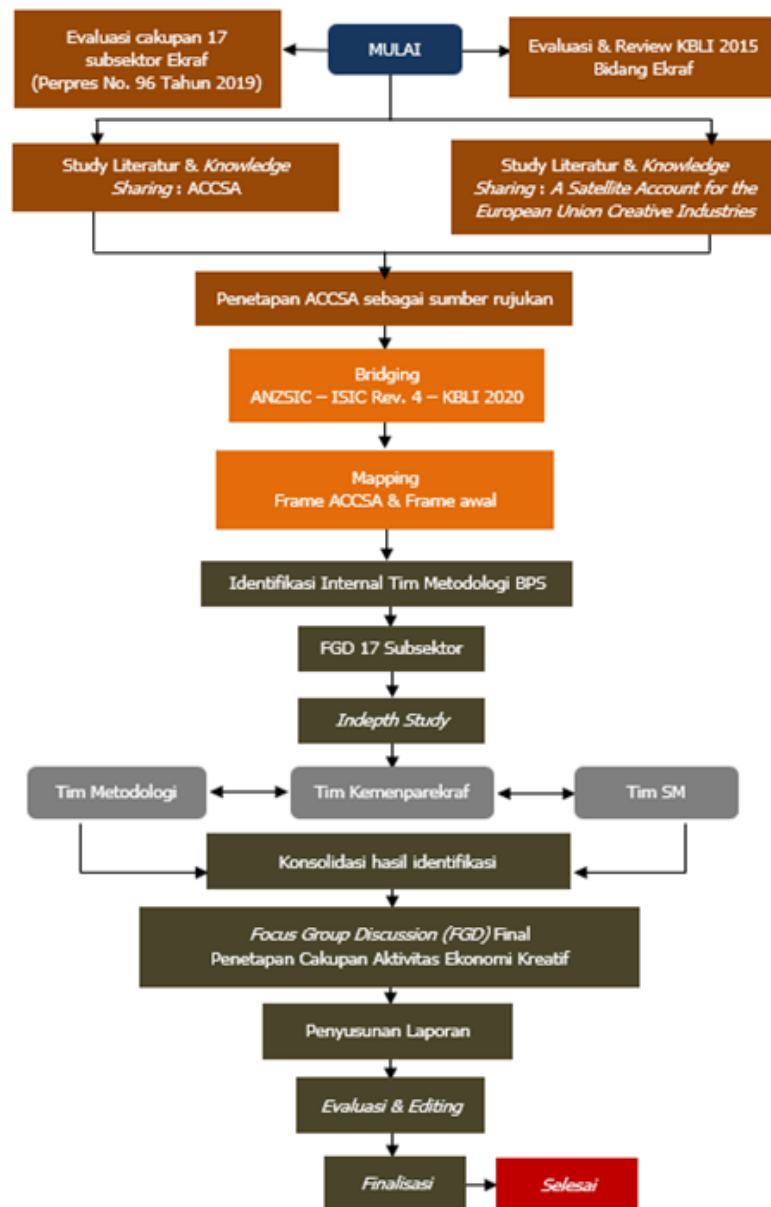
Sumber utama penyusunan cakupan aktivitas pariwisata dalam KBLI 2020 masih merujuk pada referensi internasional, yakni *International Recommendations for Tourism Statistics (IRTS)* 2008. Sedangkan untuk referensi nasional juga masih merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan. Sumber pendukungnya adalah Peraturan Menteri Pariwisata No. 10 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2015.



Gambar 3.4. Metodologi Penyusunan Cakupan Aktivitas Pariwisata

Untuk metodologi penyusunan antara cakupan aktivitas pariwisata dengan ekonomi kreatif terdapat beberapa perbedaan. Penyusunan cakupan aktivitas ekonomi kreatif jauh lebih kompleks dibanding pariwisata, karena penyusunannya di tahun ini menggunakan rujukan baru (ACCSA). Proses penyusunan cakupan aktivitas ekonomi kreatif dalam KBLI 2020 dimulai dengan melakukan evaluasi dan review kembali frame awal KBLI 2015 Bidang

Ekonomi Kreatif. Evaluasi dilakukan melalui *bridging* frame awal KBLI 2015 Bidang Ekonomi Kreatif dengan KBLI 2020. Evaluasi dan review kembali juga dilakukan pada rujukan yang digunakan pada saat penyusunan cakupan ekonomi kreatif di tahun 2016, yakni Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif. Evaluasi pada Perpres tersebut terkait jumlah subsektor yang mengalami perubahan dari 16 subsektor menjadi 17 subsektor akibat adanya pemecahan subsektor aplikasi dan game developer menjadi dua subsektor terpisah, seperti yang tertuang dalam Perpres terbaru yakni Perpres Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Langkah selanjutnya setelah dilakukan evaluasi terhadap frame awal KBLI 2015 Bidang Ekonomi Kreatif dan Perpres terbaru adalah melakukan studi literatur dan *knowledge sharing*. Studi literatur dilakukan pada beberapa referensi dari berbagai negara, dua diantaranya: ACCSA dan *A Satellite Account for the European Union Creative Industries*. Dari dua referensi tersebut, kemudian dilakukan penetapan satu referensi yang digunakan sebagai rujukan utama. Berdasarkan Surat Sekretaris Kementerian/ Sekretaris Utama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor B/SD/DS.00.00/315/S/2022, dalam rangka penyusunan cakupan aktivitas ekonomi kreatif dalam KBLI 2020 telah disepakati dan ditetapkan untuk menggunakan referensi ACCSA sebagai rujukan utama. Untuk lebih memahami alur kerja metodologi penyusunan aktivitas cakupan aktivitas ekonomi kreatif dalam KBLI 2020 dapat dilihat pada kerangka pikir di bawah ini (Gambar 3.5).



Gambar 3.5. Metodologi Penyusunan Cakupan Aktivitas Ekonomi Kreatif

2. Penyusunan Laporan Ruang Lingkup Maritim 2022

Pada tahun 2022 dilakukan konfirmasi lanjutan ke K/L terhadap lapangan usaha maritim merupakan kesepakatan antara tim teknis dan K/L terkait dan masukan tim neraca, maka selanjutnya, terdapat kesepakatan menjadi 374 kode 5 digit KBLI 2020 yang sudah melalui berbagai tahapan identifikasi data maupun informasi keadaan lapangan K/L. Hasil indentifikasinya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.10. Jumlah KBLI Kemaritiman 2022 Hasil Identifikasi Jumlah Kelompok

Jumlah Kelompok (5 Digit KBLI 2020)				Jumlah
No	Hasil	Tercakup <i>Ocean Accounts</i>	Tidak Tercakup <i>Ocean Accounts</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Maritim	314	60	374
2	Non Maritim	102	-	102
	Jumlah	416	60	476

Dalam proses penyelesaian Laporan Penyusunan Ruang Lingkup PDB Kemaritiman 2022 dilakukan identifikasi untuk KBLI yang mempunyai cakupan maritim dan non-maritim. Hal tersebut dilakukan agar indikator yang dihasilkan dari penggunaan KBLI Maritim, yaitu PDB adalah murni bidang maritim.

3. Pelaksanaan Harmonisasi/Sinkronisasi dan Korespondensi Kodifikasi Pengadaan Barang/Jasa pemerintah

Merujuk pada surat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia No 3907/Menko/Marves/PE.05.00/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 perihal Aksi Afirmasi Pembelian dan Pemanfaatan Produk Dalam Negeri dalam rangka Bangga Buatan Indonesia kepada Kepala BPS agar BPS dapat melaksanakan tindak lanjut Rakor Tingkat Menteri yaitu:

- 1) Menyelesaikan penyeragaman kodifikasi data produk barang/jasa termasuk system sertifikasi TKDN dengan kode data yang digunakan untuk mengukur aktivitas ekonomi;
- 2) Menghitung dampak ekonomi dari realisasi belanja PDN.

Terkait dengan tindak lanjut nomor satu disampaikan laporan sebagaimana dibawah ini:

- Tata Kelola Bidang Penyeragaman Kodifikasi Produk
- Proses Penyeragaman Kodifikasi Produk
- Progres Penyelesaian Tahap 1 (Penyediaan data master dan relasi dari KBLI 2009, KBLI 2015, KBLI 2020, KBKI 2015, BTKI 2012, BTKI 2017 untuk digunakan pada sistem SIRUP dan SPSE LKPP)

- Progres Penyelesaian Tahap 2 (Penyediaan data relasi yang sudah diperiksa lebih lanjut antara lain: KBKI 2015 – BTKI 2017, KBKI 2015 – KBLI 2020, BTKI 2017 – BTKI 2022; master BTKI 2022)
- Progres Penyelesaian Tahap 3 (Pemadanan KBKI 2012-KBKI 2015 pada data rekanan yang terdapat pada system SIRUP LKPP; Penyediaan data relasi yang sudah diperiksa lebih lanjut antara lain: KBKI 2015 – BTKI 2022, KBKI 2015 – KBLI 2020.

Kerja Sama Register Usaha

Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei telah bersurat kepada Direktorat Diseminasi Statistik dengan Nomor: B-352/03100/VS.025/6/2022 tanggal 14 Juni 2022 perihal permintaan data penerbitan surat izin usaha perdagangan melalui sistem elektronik (SIUPMSE). Selanjutnya Direktorat Diseminasi Statistik bersurat kepada Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dengan Nomor B-970-0/03200/KS.000/06/2022 tanggal 22 Juni 2022 perihal permintaan data penerbitan surat izin usaha perdagangan melalui sistem elektronik (SIUPMSE). Pada tanggal 23 Juni 2022 sekretariat SBR menerima data SIUPMSE dan datanya telah digunakan untuk meng-update SBR.

3.1.2. Perbandingan Capaian Kinerja Total Tahun 2022 sampai dengan T-4 (2018)

Selama jangka waktu 2018-2022 terdapat perubahan jumlah indikator. Pada 2018 dan 2019 terdapat 11 indikator, 2020 terdapat 5 indikator, 2021 terdapat 7 indikator dan 2022 terdapat 6 indikator. Indikator yang ditampilkan pada tabel di bawah adalah indikator yang bersesuaian saja.

Selanjutnya juga terdapat perubahan satuan indikator kinerja. Satuan indikator kinerja yang berubah adalah jumlah dokumen kerangka sampel yang akurat untuk menghasilkan daftar sampel unit analisis yang tepat sasaran. Sebelumnya satuan indikator ini berupa jumlah dokumen dan tahun 2021 berubah menjadi persentase. Begitu juga pada satuan indikator permintaan dan kerja sama kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei yang dilayani, sebelumnya berupa jumlah permintaan/kerja sama dan pada 2021 berubah menjadi persentase. Satuan berupa persentase dinilai lebih baik untuk menilai suatu capaian kinerja.

Dari hasil penghitungan capaian kinerja dalam rentang waktu 2018-2022 sama-sama menunjukkan hasil yang menggembirakan. Kinerja yang dicapai sudah sesuai dengan target yang ditetapkan di awal tahun.

Perbandingan Capaian Kinerja Total Tahun 2022 sampai dengan T-4 (2018) terlampir pada Lampiran 1.

3.1.3. Realisasi Kinerja per IKU dari Tahun 2022 sampai dengan Tahun Pertama Periode Renstra (2020)

Capaian kinerja Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei terhadap target Renstra 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Secara umum, jika capaian 2022 dibandingkan dengan target Renstra 2020, semuanya sudah mencapai target dengan rata-rata capaian sebesar 116,67 persen. Target Renstra 2020 memang lebih rendah dari target 2022 sehingga hasil penghitungannya bisa di atas 100 persen. Tabel realisasi kinerja per IKU dari tahun 2022 sampai dengan tahun pertama periode Renstra (2020) terlampir pada Lampiran 2.

3.1.4. Realisasi Kinerja per IKU Tahun 2022 terhadap Target Renstra Tahun 2022

Capaian kinerja Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei terhadap target Renstra 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Secara umum, jika capaian 2022 dibandingkan dengan target Renstra 2022, semuanya sudah mencapai target dengan rata-rata capaian sebesar 100 persen. Tabel realisasi kinerja per IKU tahun 2022 terhadap target Renstra tahun 2022 terlampir pada Lampiran 3.

3.1.5. Realisasi Kinerja per IKU Tahun 2022 terhadap Target Akhir Renstra 2024

Capaian kinerja Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei terhadap target Renstra 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Secara umum, jika capaian 2022 dibandingkan dengan target Renstra 2024, semuanya sudah mencapai target dengan rata-rata capaian sebesar 133,33 persen. Terdapat target Renstra 2024 yang memang lebih rendah dari target 2022 yaitu pada indikator jumlah publikasi/laporan standar data dan klasifikasi statistik sebagai rujukan bagi produsen data sehingga hasil penghitungannya bisa di atas 100 persen. Tabel realisasi kinerja per IKU tahun 2022 terhadap target akhir renstra 2024 terlampir pada Lampiran 4.

3.1.6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Pada 2022 terdapat beberapa program/kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja Direktorat PMSS diantaranya:

Persentase data SBR yang mutakhir dan berkualitas

Berdasarkan Laporan *Statistical Business Register* (SBR) 2022 pada tahun 2013, BPS mulai membangun SBR dengan nama *Integrated Business Register* (IBR) yang bertujuan untuk mengintegrasikan data direktori seluruh *subject matter* secara terpusat ke dalam satu sistem. SBR ditetapkan sebagai salah satu prinsip dasar transformasi statistik dan peningkatan kualitas melalui program STATCAP-CERDAS dan Reformasi Birokrasi BPS. SBR

dibangun dengan konsep dan definisi unit statistik yang baku mengikuti *System of National Account (SNA) 2008. Statistical Business Register (SBR)* merupakan daftar unit ekonomi yang terstruktur dan termutakhirkan secara reguler dalam suatu wilayah, yang dipelihara oleh institusi statistik untuk tujuan statistik. SBR mempunyai peran penting dalam memproduksi statistik ekonomi. SBR berfungsi menyediakan populasi unit statistik ekonomi sebagai kerangka sampel untuk survei-survei ekonomi. SBR mengintegrasikan data dari administratif data dan sumber lain (*sensus/survei, profiling, dll*) sehingga dapat digunakan untuk menyusun demografi bisnis.

Berdasarkan arahan Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik, dibentuklah Tim Kerja Pengembangan Register Usaha (PRU) sebagai tim kerja yang bertanggung jawab dalam pengelolaan SBR. Pembentukan Tim diharapkan dapat membuat jejak SBR di BPS menjadi lebih nyata. Hal ini telah dibuktikan dengan meningkatnya jumlah pemanfaatan data SBR di tahun 2021 dan 2022 serta keberhasilan akuisisi data administrasi dari beberapa sumber data ke dalam SBR. Adapun *output* dan kegiatan SBR selama tahun 2022 adalah sebagai berikut.

1. Integrasi dan Pemutakhiran Data SBR (*Input SBR*)

Pada tahun 2022, SBR melakukan integrasi data dengan mengumpulkan seluruh database perusahaan yang dimiliki oleh seluruh Subject Matter di BPS. Pengumpulan database tersebut dilakukan dengan cara membuat Form Identifikasi Ketersediaan Sistem/Aplikasi Updating Direktori dan Pengolahan Survei. Pengumpulan *database* dengan cara seperti ini bukanlah cara yang baik dalam melakukan integrasi data dari setiap subject matter, tetapi hal ini perlu dilakukan untuk proses awal integrasi data dalam memperkaya *database* SBR dan langkah awal ini adalah langkah yang paling cepat yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kendala yang terjadi dalam proses ini adalah setiap *database* dari subject matter memiliki struktur yang berbeda - beda sehingga tidak dapat langsung dilakukan integrasi dengan *database* SBR. Sebelum melakukan integrasi *database* subject matter dan *database* SBR, perlu dilakukan identifikasi variabel-variabel yang ada di *database* subject matter kemudian mencocokkan variabel tersebut ke dalam variabel SBR. Selain dilakukan integrasi data juga dilakukan uji coba *profiling*. Tujuan dari uji coba *profiling* untuk memperoleh profil perusahaan yang berskala usaha menengah dan besar di Indonesia baik milik negara maupun swasta dan menggambarkan hubungan/ *relationship* dalam grup sesuai konsep pengklasifikasian unit statistik grup *enterprise, enterprise, establishment* dan unit penunjang. Selain itu, tujuan lain adalah untuk mendapatkan dan melengkapi informasi perusahaan data direktori perusahaan sesuai kondisi terkini. Pelaksanaan uji coba *profiling* dilaksanakan pada bulan Juni 2022 dengan jumlah target

perusahaan sebanyak 286 perusahaan. Profiler berasal dari fungsi PRU dengan jumlah 9 profiler. Di akhir Juni pelaksanaan uji coba profiling telah 100 persen selesai dilaksanakan. Para profiler melakukan kegiatan ini di tautan <http://frs-de.bps.go.id/sbr>. Hasil dari uji coba profiling bulan Juni 2022 adalah untuk uji coba snapshot dan CEEF.

2. Pengembangan FRS/SBR Milestone 2

Sistem SBR merupakan sistem yang memfasilitasi pengelolaan data Bisnis dan mendukung penyediaan kerangka bisnis yang termutakhirkan untuk mendukung pelaksanaan Sensus dan Survei di BPS. Fokus pada milestone 2 adalah terkait integrasi data dan pembangunan aplikasi Matcha (*Matching* dan *Assessment*) sebagai salah satu modul/bagian dari FRS. Fitur-fitur pada aplikasi Matcha ini masih akan terus melalui proses perbaikan dan pengembangan sesuai dengan kebutuhan sistem. Beberapa fitur yang akan dikembangkan di tahun 2023 diantaranya adalah fitur pengelolaan data duplikat dan fitur perbaikan kesesuaian antara kode KBLI dengan aktivitas atau nama perusahaan. Selain pengembangan integrasi data dan pembangunan aplikasi Matcha, di tahun 2022 ini sudah dilakukan pengambilan *snapshot* dan CEEF data SBR sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada semester 1 (1 Juli 2022) dan semester 2 (1 Januari 2023).

3. Pemanfaatan SBR

SBR memberikan pelayanan permintaan data dari beberapa unit kerja internal untuk keperluan penyiapan kerangka survei di antaranya yaitu :

a. Pilot *Economy Wide Survey* (EWS)

Pilot EWS 2022 merupakan pilot survei berbasis usaha/perusahaan yang terintegrasi dengan implementasi proses bisnis mengacu Statistical Business Framework and Architecture (SBFA). Survei ini merupakan lanjutan dari Pilot EWS 2021. Salah satu sumber data dalam pembuatan kerangka sampel adalah SBR. Pilot EWS 2022 dilakukan di 3 provinsi yaitu Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta. Dalam tahapan penyediaan kerangka sampel untuk Pilot EWS 2022, langkah pertama, SBR menyiapkan daftar perusahaan aktif hasil dari snapshot dan CEEF dengan beberapa variabel inti. Daftar ini akan digunakan untuk studi terhadap kerangka sampel yang akan dibentuk. Kedua, rekapitulasi jumlah usaha untuk penyusunan desain sampel untuk Fungsi Pengembangan Desain Sensus dan Survei (PDSS). Untuk kebutuhan desain sampel, kriteria kueri untuk kerangka sampel yang disiapkan SBR antara lain yaitu kategori KBLI A s.d. U; KBLI 5 digit dan skala usaha terisi/tidak boleh kosong; jaringan usaha: semua bentuk jaringan.

b. Survei Pariwisata

Direktorat Pariwisata melakukan permintaan daftar perusahaan aktif yang bergerak di bidang pariwisata. Keterkaitan tersebut dapat dilihat dari daftar KBLI yang diberikan sebagai landasan perusahaan yang bergerak di bidang tersebut. Adapun beberapa ringkasan dari permintaan tersebut:

1. Terdapat sekitar 617.319 perusahaan terkait bidang tersebut
2. Data tersebut menggunakan KBLI 2015 sampai dengan lima digit
3. Pemilihan aktivitas KBLI sesuai dengan permintaan sejumlah 159 kode KBLI berdasarkan Konkordansi Klasifikasi Industri Pariwisata ke PDB Indonesia.

c. Sensus Pertanian 2023 (ST2023)

Dalam menunjang dan mendukung kegiatan Sensus Pertanian 2023, pemanfaatan SBR dilakukan dalam persiapan prelist untuk Gladi Bersih ST2023. Prelist merupakan integrasi hasil pemutakhiran Daftar Perusahaan Pertanian UPB-UTL (DPP UPB-UTL) dengan SBR melalui proses *matching* untuk mendapatkan IDSBR serta pemutakhiran terhadap data SBR itu sendiri. Selain wilayah Gladi Bersih ST2023, wilayah lain juga telah dilakukan integrasi antara hasil pemutakhiran DPP UPB-UTL dengan SBR sebagai persiapan untuk prelist usaha/perusahaan di bidang pertanian di ST2023.

d. Neraca Produksi Domestik Bruto (PDB) Ekonomi Kreatif

SBR digunakan sebagai salah satu sumber data untuk studi pembentukan PDB Ekonomi Kreatif. Dalam hal tersebut, SBR melakukan penyediaan terhadap daftar perusahaan sesuai dengan kategori lapangan usaha dengan KBLI tertentu.

e. Neraca Produksi Domestik Bruto (PDB) Maritim

SBR digunakan sebagai salah satu sumber data untuk studi pembentukan PDB Maritim dan Non Maritim. Dalam hal tersebut, SBR melakukan penyediaan terhadap daftar perusahaan sesuai dengan kategori lapangan usaha dengan KBLI tertentu.

f. Foreign Affiliates Statistics (FATS)

SBR sebagai salah satu sumber data usaha/perusahaan, manfaatnya juga dapat dilakukan pada bidang neraca keuangan. FATS memanfaatkan SBR untuk melakukan identifikasi terhadap perusahaan yang memiliki afiliasi asing (Penanaman Modal Asing/PMA) atau perusahaan luar negeri yang dimiliki oleh penduduk kewarganegaraan Indonesia.

4. Kerjasama, Penyusunan Tata Kelola dan Keikutsertaan dalam Forum Internasional

Kerjasama, penyusunan tata Kelola dan keikutsertaan dalam forum internasional yang dilakukan *Statistical Business Register* pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

a. Kerja Sama dengan Kementerian/Lembaga (K/L)

Dalam rangka pemanfaatan data administrasi sebagai salah satu sumber data SBR telah dilakukan koordinasi dengan beberapa K/L, antara lain:

1. Permintaan Data OSS BKPM

Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei telah bersurat kepada Direktorat Data dan Informasi Kementerian Investasi/BKPM dengan Nomor: B-1051/03100/VS.020/11/2022 tanggal 30 November 2022 perihal permohonan data direktori perusahaan yang melakukan perizinan melalui *Online Single Submission* (OSS). Namun surat tersebut belum mendapatkan feedback.

2. Permintaan Data SIUPMSE Kementerian Perdagangan

Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei telah bersurat kepada Direktorat Diseminasi Statistik dengan Nomor: B-352/03100/VS.025/6/2022 tanggal 14 Juni 2022 perihal permintaan data penerbitan surat izin usaha perdagangan melalui sistem elektronik (SIUPMSE). Selanjutnya Direktorat Diseminasi Statistik bersurat kepada Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dengan Nomor B-970-0/03200/KS.000/06/2022 tanggal 22 Juni 2022 perihal permintaan data penerbitan surat izin usaha perdagangan melalui sistem elektronik (SIUPMSE). Pada tanggal 23 Juni 2022 sekretariat SBR menerima data SIUPMSE dan datanya telah digunakan untuk meng-update SBR.

3. Permintaan Data SIINas Kementerian Perindustrian

Berbekal MoU antara BPS dan Kementerian Perindustrian Nomor: 283.1/M-IND/5/2018 dan 07/KS.M/07-V/2018 tanggal 7 Mei 2018, Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei telah bersurat kepada Pusat Data dan Informasi Kementerian Perindustrian dengan Nomor: B-1054/03100/VS.020/11/2022 tanggal 30 November 2022 perihal permohonan data direktori perusahaan pada Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Namun surat tersebut belum mendapatkan feedback.

4. Koordinasi dengan Kementerian KUKM

Berbekal MoU antara BPS dan Kementerian KUKM Nomor: 11/KB/M.KUKM/V/2017 dan 04/KS.M/23-V/2017 tanggal 23 Mei 2017, pada tahun 2022 telah ditandatangani PKS antara BPS dan Kementerian KUKM Nomor: 34/NKB/SM/X/2022 dan 33.01.22/HK.610/PKS/10/2022 tanggal 7 Oktober 2022 tentang percepatan pendataan lengkap koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah dan penyusunan indikator makro. Salah satu isi dari PKS tersebut adalah pihak kementerian KUKM berkewajiban membagikan data mikro hasil PL-KUMKM kepada BPS. Karena kegiatan pengolahan

PL-KUKMK 2022 baru diselesaikan di akhir tahun sehingga data tersebut belum diterima BPS.

5. Koordinasi dengan Kementerian PUPR

Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei telah melakukan koordinasi dengan Kementerian PUPR dalam rapat pembahasan pertukaran data konstruksi yang diselenggarakan oleh Direktorat Statistik Industri pada tanggal 3 November 2022. Rapat tersebut mengundang Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jendral Kementerian PUPR dan Sekretaris Ditjen Bina Konstruksi, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian PUPR, serta beberapa Tim terkait di BPS.

b. Penyusunan Draft Juknis Penyiapan Statistik Ekonomi Terintegrasi

Petunjuk Teknis Penyiapan Statistik Ekonomi Terintegrasi disusun untuk mendukung pembangunan basis data statistik ekonomi terintegrasi. Petunjuk teknis penyiapan statistik ekonomi terintegrasi diharapkan dapat menjadi panduan bagi setiap pengampu data statistik ekonomi dalam penyiapan data statistik ekonomi yang berkualitas, mutakhir dan akurat. Data statistik ekonomi yang berkualitas akan mempermudah Neraca Nasional dalam menghasilkan analisis yang lebih baik dan kesimpulan yang dengan presisi tinggi.

Tujuan umum penyusunan petunjuk teknis penyiapan statistik ekonomi terintegrasi adalah untuk mengatur tata kelola penyiapan data statistik ekonomi mulai dari data dikumpulkan hingga data dibagipakaikan. Sedangkan tujuan khusus dari penyiapan statistik ekonomi terintegrasi adalah membangun data statistik ekonomi yang komprehensif, terintegrasi dan mutakhir.

Adapun ruang lingkup penyusunan petunjuk teknis penyiapan statistik ekonomi terintegrasi menjelaskan latar belakang terbitnya petunjuk teknis ini, pihak-pihak yang terlibat baik internal BPS maupun eksternal BPS, tata kelola dan koordinasi antar pihak-pihak yang terlibat, langkah-langkah penyiapan dan tata kelola aliran data statistik ekonomi dan pemanfaatan data statistik ekonomi terintegrasi tersebut baik internal BPS maupun eksternal BPS.

Ada dua kerangka kerja utama yang mendasari penyusunan Petunjuk Teknis Penyiapan Statistik Ekonomi Terintegrasi.

- a. Sistem Neraca Nasional (*System of National Account*)
- b. *Statistical Business Framework Architecture (SBFA)*

Petunjuk teknis penyiapan statistik ekonomi terintegrasi mengatur konteks dan konten dalam penyiapan statistik ekonomi terintegrasi. Secara konteks, juknis mengatur

proses bisnis antar pihak-pihak yang terlibat. Sementara secara konten, juknis mengatur alur tata cara pertukaran data dan pemutakhiran data.

Adapun tata kelola yang akan diatur dalam juknis ini sebagai berikut:

1. Akuisisi Data
 2. Pemeliharaan Basis Data Live SBR
 3. Pembuatan Snapshot, CEEF, dan Kerangka Survei
 4. Pembuatan Kerangka Sampel Usaha
 5. Penerbitan Statistik Demografi Usaha
 6. *Monitoring* dan Pengukuran Kualitas Data SBR
 7. Pengiriman Hasil Survei ke SBR
- c. Kontribusi Forum Internasional

SBR aktif mengikuti forum internasional untuk dapat mengikuti perkembangan metode dan teknologi dari berbagai negara untuk mengoptimalkan proses bisnis SBR. Beberapa kegiatan/forum internasional yang diikuti pada tahun 2022 antara lain : keikutsertaan tim SBR dalam Tim *Task Force* Globalisasi dan Digitalisasi dalam Komite Ahli PBB terkait Statistik Usaha dan Perdagangan/ *United Nations Committee of Experts on Business and Trade Statistics (UNCEBTS)*; partisipasi dalam pilot survei dan pertemuan UNCEBTS; partisipasi dalam pertemuan *Statistical, Economic and Social Research and Training Centre for Islamic Countries (SESERIC) Conference*; diskusi progress dan tantangan SBR dalam *technical assistance (TA) Australian Bureau of Statistics (ABS)* di bawah payung Program Kerja Sama BPS dan ABS; kontribusi dalam memberikan tanggapan terkait dokumen agenda sidang pada *52nd Session of the United Nations Statistical Commission (UNSC)* Maret 2022 oleh *United Nations Statistical Division (UNSD)* yaitu dokumen *3(e) Business and Trade Statistics*;

Rincian kegiatan-kegiatan yang dilakukan SBR pada tahun 2022 ini dirangkum dalam Laporan *Statistical Business Register 2022*.

Permasalahan/kendala yang dihadapi dalam aktivitas penyusunan dan pengembangan SBR:

1. Sumber Daya Manusia
 - Terbatasnya SDM teknologi informasi yang dapat mengembangkan dan membangun sistem berbasis *website/aplikasi* guna mengakomodasi kebutuhan dari penerapan atas SBR agar berjalan efektif dan efisien; saat ini masih mengandalkan pengembang sistem (*developer*) Direktorat PMSS yang tidak hanya mengerjakan sistem tetapi juga mengerjakan proses bisnis rutin terkait pengembangan konten/pemeliharaan SBR. Hal ini ke depan

2. Koordinasi dan Sosialisasi
 - Belum berjalannya koordinasi di internal BPS sendiri maupun BPS dengan K/L dalam integrasi data SBR.
 - Terbatasnya sisi anggaran dalam melakukan pengembangan SBR.
3. Volume/ beban pekerjaan
 - Meningkatnya sumber data untuk mengupdate SBR baik internal maupun eksternal untuk diintegrasikan dan dimutakhirkan secara berkelanjutan.
 - Meningkatnya permintaan data SBR untuk kerangka induk (*master frame*) survei berbasis perusahaan/usaha secara berkelanjutan.
 - Kebutuhan pengembangan dan penyusunan metodologi integrasi data SBR yang belum memiliki proses bisnis yang efisien dan sarana yang memadai untuk dapat memberikan output yang berkualitas dan mendukung berbagai kebutuhan berbagai pengguna termasuk kebutuhan data baru terkait isu-isu dampak fenomena statistik terkait pandemi, digitalisasi, globalisasi, dan *sustainability*.
4. Konten dan *Support Data*
 - Pada SBR, masih terdapat isian variabel esensial SBR pada direktori usaha/perusahaan SM yang masih kosong/tidak lengkap.
 - Terdapat inkonsistensi antara isian kode KBLI dengan deskripsi kegiatan
 - Diperlukan pengecekan duplikasi data dalam basis data SBR secara berkala

Strategi untuk mengatasi masalah/kendala dalam aktivitas penyusunan standardisasi dan klasifikasi statistik serta penyusunan dan pengembangan SBR:

 1. Meningkatkan koordinasi antara SBR dan *subject matter*, untuk menyepakati pembangunan tatakelola transfer data hasil survei dan dilakukan sosialisasi ke *subject matter* terkait 25 variabel esensial SBR.
 2. Berkoordinasi dengan *subject matter* untuk mengisi variabel SBR yang belum terisi.
 3. Berkoordinasi dengan tim Neraca Nasional untuk upaya peningkatan pemahaman SNA melalui *Focus Group Discussion (FGD)* ataupun *capacity building*.
 4. Menyusun Juknis Penyiapan Statistik Ekonomi Terintegrasi untuk mendukung pembangunan basis data statistik ekonomi terintegrasi. Petunjuk teknis penyiapan statistik ekonomi terintegrasi diharapkan dapat menjadi panduan bagi setiap pengampu data statistik ekonomi dalam penyiapan data statistik ekonomi yang berkualitas, mutakhir dan akurat.
 5. Menindaklanjuti MoU Pertukaran Data BPS, *Online Single Submission (OSS)* BKPM, dan Kementerian KUKM, untuk mendapatkan data direktori perusahaan sebagai bahan untuk memperbarui data BPS secara terus menerus dan inisiasi kerjasama dengan

Kementerian/Lembaga lainnya, dalam hal ini terkait dengan SBR seperti yang sudah dilakukan di tahun 2022 yaitu kerjasama dengan SIUPMSE Kementerian perdagangan.

Pembangunan Aplikasi Mtacha

Pembangunan aplikasi Matcha (*Matching* dan *Assessment*) sebagai salah satu modul/bagian dari FRS merupakan aplikasi untuk melakukan *matching* data dan *assessment* data di SBR. Matcha terdiri dari beberapa fitur, diantaranya:

- Manajemen pengguna / *user*
- Dashboard profil SBR
- Manajemen *Matching* dan *Assessment*
- *Matching*
- *Assessment*
- Manajemen Kegiatan Data
- Manajemen Katalog Data SBR

Fitur-fitur pada aplikasi Matcha ini masih akan terus melalui proses perbaikan dan pengembangan sesuai dengan kebutuhan sistem. Beberapa fitur yang akan dikembangkan di tahun 2023 diantaranya adalah fitur pengelolaan data duplikat dan fitur perbaikan kesesuaian antara kode KBLI dengan aktivitas atau nama perusahaan. Selain pengembangan integrasi data dan pembangunan aplikasi Matcha, di tahun 2022 ini sudah dilakukan pengambilan *snapshot* dan CEEF data SBR sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada semester 1 (1 Juli 2022) dan semester 2 (1 Januari 2023).

3.2. Prestasi dan Inovasi Direktorat PMSS Tahun 2022

Prestasi

Prestasi-prestasi yang telah dicapai Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei pada tahun 2022 diantaranya:

- 1 Terdapat pegawai Direktorat PMSS yang mempublikasikan *R Package msahB: Multivariate Small Area Estimation using Hierarchical Bayesian Method*.
- 2 Terdapat pegawai Direktorat PMSS yang mempublikasikan artikel ilmiah berjudul *msae: An R Package of Multivariate Fay-Herriot Models for Small Area Estimation pada The R Journal* (Vol. 13, Issue 2, p. 28) yang diterbitkan oleh *The R Foundation*.
- 3 Terdapat pegawai Direktorat PMSS yang mengikuti *Workshop on the Implementation of the Degree of Urbanisation Methodology in South-East-Asian countries* di Thailand yang diselenggarakan oleh *United Nations Subregional Workshop on the Implementation of the Degree of Urbanisation Methodology in South-East-Asian Countries*.

- 4 Terdapat pegawai Direktorat PMSS yang berpartisipasi dalam *The Expert Group Meeting on Ground Truth Data, FAO* dengan artikel ilmiah berjudul *Ground Truth Data for Land Cover Classification in Indonesia*.
- 5 Terdapat pegawai Direktorat PMSS yang mempublikasikan artikel ilmiah berjudul *Estimation of Education Indicators in East Java Using Multivariate Fay-Herriot Model* pada *Proceedings of The International Conference on Data Science and Official Statistics* (Vol. 2021, Issue 1, pp. 108–118) yang diterbitkan oleh Politeknik Statistika STIS.
- 6 Terdapat pegawai Direktorat PMSS yang mempublikasikan artikel ilmiah berjudul *Big Data for Small Area Estimation: Happiness Index with Twitter Data* pada *Proceedings of The International Conference on Data Science and Official Statistics* (Vol. 2021, Issue 1, pp. 963–972) yang diterbitkan oleh Politeknik Statistika STIS.
- 7 Terdapat pegawai Direktorat PMSS yang turut berpartisipasi dalam Lomba Bedah Data APBD 2022 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan dan meraih Juara I Kategori Subrinci dengan kajian ilmiah berjudul *Standardisasi Nomenklatur Akun Level 6 dan Analisis Efektivitas Belanja Operasional APBD di Indonesia*.
- 8 Terdapat pegawai Direktorat PMSS yang turut berpartisipasi dalam Lomba Bedah Data APBD 2022 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan dan meraih Juara III Kategori Subkategori dengan kajian ilmiah berjudul *Standardisasi Nomenklatur Anggaran dan Prediksi Ketercapaian Indikator Strategis*.
- 9 Terdapat pegawai Direktorat PMSS yang turut berpartisipasi dalam Jaga Data Challenge 2022 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan meraih Juara II dengan kajian ilmiah berjudul *Proxy Indeks Integritas Kementrian/Lembaga Menggunakan Big Data*.
- 10 Terdapat pegawai Direktorat PMSS yang turut berpartisipasi dalam Festival Data Regsosek yang diselenggarakan oleh Bappenas dan meraih juara III dengan kajian ilmiah berjudul *Modul SEPAKAT-ORION: Dashboard Analisis Profiling Kesejahteraan Keluarga dari Data REGSOSEK Menggunakan Pendekatan Machine Learning dan Analisis Geospasial*.
- 11 Terdapat pegawai Direktorat PMSS yang mempublikasikan artikel ilmiah berjudul *Predicting Diabetes Mellitus Using Catboost Classifier and Shapley Additive Explanation (SHAP) Approach* pada *BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika dan Terapan* vol. 16, no. 2, pp. 615-624, Jun. 2022.5, Issue 1, pp. 80–88 yang diterbitkan oleh Universitas Negeri Jakarta.

- 12 Terdapat pegawai Direktorat PMSS yang mempublikasikan artikel ilmiah berjudul Perbandingan Metode SAE EBLUP dan SAE HB Pada Pendugaan Area Kecil (Studi Kasus Pendugaan Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur pada Jurnal Statistika Dan Aplikasinya, 6(1), 96 – 108.
- 13 Terdapat pegawai Direktorat PMSS yang mempublikasikan artikel ilmiah berjudul Penyusunan Derajat Urbanisasi untuk Perhitungan Indikator *Sustainable Development Goals*: Studi Kasus Kepulauan Nusa Tenggara pada Seminar Nasional Official Statistics 2022.
- 14 Terdapat pegawai Direktorat PMSS yang mempublikasikan artikel ilmiah berjudul Pendugaan Area Kecil Persentase Anak-Anak Usia Kurang dari 18 Tahun yang Hidup di Bawah Garis Kemiskinan Tingkat Kabupaten/Kota di Indonesia pada Seminar Nasional Official Statistics 2022.
- 15 Pemanfaatan analisis geospasial untuk pembentukan derajat urbanisasi (*Degree of urbanization*) dan perhitungan SDGs 9.1.1 (*Rural Access Index*)

3.3. Realisasi dan Efisiensi Anggaran Tahun 2022

3.3.1. Pagu dan Realisasi Anggaran menurut Program dan Sasaran

Pagu anggaran Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei menjalankan fungsi pemerintahan dalam Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik selama tahun 2022 adalah sebesar 1,8 milyar rupiah. Realisasi anggaran menurut program/kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.11. Pagu dan Realisasi Anggaran Menurut Program Direktorat PMSS Tahun 2022

No.	Program	Pagu 2022 (Rp)	Realisasi s/d Desember 2022 (Rp)	Persentase Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik				
2900 Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei				
005	Dokumen, laporan, dan publikasi pengembangan metodologi sensus dan survei	800.356.000	790.066.964	89,74
2905. Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan				

006	Publikasi/Laporan Sensus Penduduk	320.004.000	309.120.000	96,60
2910. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				
006	Publikasi/Laporan Sensus Pertanian	880.356.000	790.066.964	91,22
	Jumlah	1.949.894.000	1.793.825.437	92,00

Secara umum, penyerapan anggaran pada Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik sudah dilakukan dengan sangat maksimal. Hal ini ditunjukkan dengan realisasi anggaran sebesar 92,79%. Penyerapan anggaran tertinggi pada kegiatan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan (Kode 2905) sebesar 96,60 persen dan yang terendah pada kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Kode 2910) sebesar 91,22%.

3.3.2. Perbandingan Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Program dan Sasaran

Tabel 3.12. Realisasi Anggaran Menurut Program dan Sasaran Direktorat PMSS Tahun 2022

No.	Program/Sasaran	Pagu 2022 (Rp)	Realisasi s/d Desember 2022 (Rp)	Persentase Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik				
Tujuan 1 : Terselenggaranya kegiatan sensus dan survei yang menerapkan metodologi yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas				
1	Tersedianya metodologi sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas	200.142.000	161.684.000	80,78
2	Tersedianya kerangka sampel yang akurat untuk menghasilkan daftar sampel unit analisis yang tepat sasaran	213.905.117	210.853.457	98,57
3	Tersedianya standar data dan klasifikasi statistik sebagai rujukan bagi produsen data	546.129.883	483.526.627	88,54
4	Tersedianya master dan peta wilayah kerja statistik	989.717.000	937.761.303	94,75

	yang mutakhir dan berkualitas			
Tujuan 2 : Mewujudkan kemandirian penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral dalam bidang metodologi sensus dan survei bagi produsen data				
5	Terwujudnya pembinaan kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei	0	0	0
6	Terwujudnya kerja sama kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei	0	0	0
	Jumlah	1.949.894.000	1.793.825.437	92,00

Penjelasan per sasaran (per indikator):

Indikator pertama: Tersedianya metodologi sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas

Anggaran yang tersedia untuk mencapai sasaran satu pada tujuan pertama sebesar Rp.200.142.000,-. Dari anggaran yang disediakan selama tahun 2022 dapat diserap sebesar Rp.161.684.000,- atau sebesar 80.78 persen. Anggaran ini berasal dari kegiatan Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei dan kegiatan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.

Anggaran yang berasal dari kegiatan Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei, direncanakan untuk pembiayaan pelaksanaan *Capacity Building* Bidang Metodologi dan Supervisi Metodologi ke BPS Provinsi/Kabupaten/Kota. Penyerapan ini sebagian besar digunakan untuk melakukan supervisi ke BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait penerapan metodologi sampling dalam pelaksanaan survei BPS. Penyerapan yang tidak terlalu tinggi dikarenakan adanya anggaran honor narasumber dan biaya penggantian pulsa peserta *Capacity Building* PMSS yang tidak dimanfaatkan. Hal ini dikarenakan kegiatan dilakukan secara daring/ *online* pada jam kerja.

Sementara anggaran yang berasal dari kegiatan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan digunakan untuk mendukung kegiatan Gladi Bersih *Post Enumerations Survey* ST2023. Kegiatan ini merupakan rangkaian persiapan pelaksanaan Sensus Pertanian Tahun 2023. Dimana kegiatan dilakukan di tiga Kabupaten sampel, yaitu Kabupaten Simalungun, Kabupaten Malang dan Kabupaten Bima.

Indikator kedua: Tersedianya kerangka sampel yang akurat untuk menghasilkan daftar sampel unit analisis yang tepat sasaran

Anggaran yang tersedia untuk mencapai sasaran kedua pada tujuan pertama untuk menyediakan kerangka sampel usaha dan rumah tangga yang akurat sebesar Rp 213.905.117,-. Anggaran ini berasal dari Pagu 2900 Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei. Anggaran ini direncanakan untuk pembiayaan pelaksanaan Konsinyering Penyusunan *Enumeration Area* (EA) dari SLS dan Penyusunan Statistik Ekonomi Terintegrasi. Dari anggaran yang disediakan selama tahun 2022 dapat diserap Rp 210.853.457,- atau sebesar 98,57 persen. Penyerapan ini sebagian besar digunakan untuk melakukan supervisi ke BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait pemutakhiran master wilkerstat, pemutakhiran data SBR dan identifikasi pengembangan SBR. Pagu yang masih ada merupakan sisa penyerapan dari konsinyering dan supervisi pemutakhiran master wilkerstat, pemutakhiran data SBR dan identifikasi pengembangan SBR ke daerah.

Indikator ketiga: Tersedianya standar data dan klasifikasi statistik sebagai rujukan bagi produsen data

Anggaran yang tersedia untuk mencapai sasaran ini pada tujuan pertama sebesar Rp 546.129.883,-. Dari anggaran yang disediakan selama tahun 2022 dapat diserap Rp 161.684.050,- atau sebesar 88,54 persen. Anggaran ini berasal dari kegiatan Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei dan kegiatan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.

Anggaran ini yang berasal dari kegiatan Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei, direncanakan untuk pembiayaan pelaksanaan Workshop Penyusunan Standar Data Statistik dan Statistik Ekonomi Terintegrasi, supervisi, pencetakan publikasi klasifikasi dan standar data dan honor narasumber. Penyerapan ini sebagian besar digunakan untuk Workshop Penyusunan Standar Data Statistik dan Statistik Ekonomi Terintegrasi yang dilaksanakan pada akhir bulan Februari 2022 dan supervisi standar data dan klasifikasi ke BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota pada bulan Agustus 2022.

Sementara anggaran yang berasal dari kegiatan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan digunakan untuk Penyusunan Klasifikasi Desa Perkotaan/Perdesaan Tahun 2022 Berdasarkan Podes 2021 yang dilakukan supervisi ground check penyusunan klasifikasi urban rural ke BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Fullboard konsinyering dalam kota penyusunan klasifikasi urban rural. Adanya anggaran honor narasumber dan Biaya Rapid Antigen dan Swab PCR yang tidak dimanfaatkan menyebabkan penyerapannya tidak terlalu tinggi.

Indikator keempat: Tersedianya master dan peta wilayah kerja statistik yang mutakhir dan berkualitas

Anggaran yang dialokasikan untuk menyediakan master dan peta wilayah kerja statistik yang mutakhir dan berkualitas sebesar Rp 989.717.000,-. Dari anggaran yang disediakan selama tahun 2022 dapat diserap Rp 937.761.303,- atau sebesar 94,75 persen. Penyerapan ini sebagian besar digunakan untuk pelaksanaan paket *meeting* dalam kota dan untuk melakukan supervisi ke BPS Provinsi maupun BPS Kabupaten/Kota. Anggaran ini berasal dari kegiatan Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei, Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, serta Publikasi/Laporan Sensus Penduduk.

Anggaran yang berasal dari kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan digunakan untuk pembiayaan kegiatan Pemutakhiran Kerangka Geospasial dan Muatan Wilkerstat ST2023. Penyerapan ini sebagian besar digunakan untuk melakukan supervisi ke BPS Provinsi maupun BPS Kabupaten/Kota dan untuk pelaksanaan paket *meeting* dalam kota. Adanya anggaran honor narasumber dan Biaya Rapid Antigen dan Swab PCR yang tidak dimanfaatkan menyebabkan penyerapannya tidak terlalu tinggi.

Anggaran yang berasal dari Publikasi/Laporan Sensus Penduduk digunakan untuk pembiayaan Penyusunan Sistem Informasi Geografis Hasil SP2020 dan Analisis Spasial Hasil SP2020. Penyerapan anggaran terbesar pada pelaksanaan paket *meeting* dalam kota.

Indikator kelima: Terwujudnya pembinaan kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei

Anggaran yang tersedia untuk mencapai sasaran ini pada tujuan kedua tidak ada karena pembinaan dilakukan berdasarkan permintaan dari Subject Matter baik dari internal maupun eksternal BPS. Hal ini dilaksanakan karena adanya undangan baik sebagai peserta atau narasumber.

Indikator keenam: Terwujudnya kerja sama kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei

Anggaran yang tersedia untuk mencapai sasaran ini pada tujuan kedua tidak ada karena kerjasam dilakukan berdasarkan permintaan dari eksternal BPS atau K/L/D/I yang terkait dengan adanya Perjanjian Kerja Sama antara kedua belah pihak.

3.3.3. Upaya Efisiensi Anggaran (penggunaan sumber daya) dan Nilai Efisiensi Anggaran

Upaya Efisiensi

Upaya efisiensi yang dilakukan Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei selama tahun 2022 diantaranya adalah:

1. Dalam rangka mendukung program pemerintah menangani pandemi COVID19, maka dilakukan penghematan pada beberapa pos anggaran antara lain pelaksanaan pelatihan dan workshop secara online sehingga mengurangi biaya akomodasi untuk peserta pelatihan dan *workshop*.
2. Pengembangan MFDOnline dilaksanakan sepenuhnya dengan *resource* internal BPS, dari analisis sistem sampai tim pengembang aplikasinya. Kegiatan ini melibatkan 2 (dua) Direktorat yaitu Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei dan Direktorat Sistem Informasi Statistik.
3. Pelaksanaan sosialisasi MFDOnline terintegrasi dengan kegiatan Peningkatan Kapasitas Bidang Metodologi Sensus dan Survei yang mengundang peserta dari BPS Provinsi. Dengan kegiatan ini dapat melakukan efisiensi dari waktu dan biaya pelatihan.
4. Pengembangan aplikasi wilkerstat berbasis android, sistem layanan Geoportal API, aplikasi Dashboard WebGIS administrator menggunakan *software* tidak berbayar (*open source*). *Developer* aplikasi tersebut berasal dari Direktorat PMSS. Hal ini meniadakan biaya pengadaan *software*.
5. Pemanfaatan layanan konsultasi klasifikasi statistik berbasis web (online) yang terintegrasi ke dalam Sistem Informasi Layanan Statistik (Silastik) dikelola bersama antara Direktorat PMSS dan Direktorat Diseminasi Statistik sehingga lebih efisien dalam komunikasi dan mudah diakses oleh pengguna secara satu pintu.
6. Pelaksanaan pembinaan Standar Data Statistik Nasional tahun 2022 terkait dengan LO dari BPS dan Kementerian/Lembaga yang terkait.
7. Laporan Klasifikasi Baku Klasifikasi Komoditas (KBKI) Pertanian menggunakan media zoom sehingga dapat menghemat pengeluaran anggaran terkait pembiayaan rapat biasa dengan tim Neraca dan tim ST2023
8. Dari sisi sumber daya energi, Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei berupaya menghemat energi listrik (misal: meminimalisasi lampu pada siang hari, tidak bekerja diluar jam kerja seorang diri di dalam ruang kantor), menghemat prasarana (misal meminimalisasi penggunaan kertas/*paperless*).

4.1. Kesimpulan

Hasil evaluasi atas pelaksanaan fungsi dan tugas Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei Badan Pusat Statistik menyimpulkan bahwa secara umum pencapaian kinerja Badan Pusat Statistik menunjukkan tingkat keberhasilan. Kesimpulan ini tercermin dari Indikator Kinerja Utama sebagai acuan tingkat keberhasilan. Semua target sasaran strategis yang telah ditetapkan berhasil dicapai dengan tingkat pencapaian indikator secara rata-rata sebesar 100 persen, bahkan lebih karena banyak permintaan pembinaan dan kerjasama baik dari internal maupun dari eksternal BPS.

4.2. Rencana Tindak Lanjut

Semakin banyaknya indikator statistik yang diperlukan oleh pengambil kebijakan menjadi tantangan bagi Direktorat PMSS untuk dapat menyusun metodologi sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas. Tindak lanjut atas evaluasi kinerja tahun 2022 adalah:

- 1) Peningkatan kapasitas SDM melalui berbagai media dan metode pembelajaran, misalnya secara *online*, forum diskusi, *knowledge sharing* antar-pegawai di dalam unit kerja serta mengoptimalkan pengaturan beban tugas yang seimbang dari segi volume, waktu, kemampuan SDM, dan jumlah SDM.
- 2) Peningkatan jumlah SDM terutama untuk menunjang indikator yang akan diusulkan pada Fungsi Pengembangan Register Usaha per Desember 2022 masih berjumlah 9 orang.
- 3) Peningkatan koordinasi dengan unit kerja terkait di internal BPS dan peningkatan manajemen/tata kelola kegiatan dalam pelaksanaan desain sensus dan survei serta pembinaan statistik sektoral di bidang metodologi, agar keseimbangan antara beban tugas, waktu, dan sumber daya yang tersedia tetap terjaga, dan tujuan tercapai.
- 4) Pemanfaatan sarana teknologi informasi dan komunikasi terkini secara optimal sangat dibutuhkan terutama teknologi *Geographical Information System* (GIS) dan *Remote Sensing* (RS) untuk kegiatan pengembangan kerangka sampel, kerangka geospasial tutupan lahan pertanian, *updating*, dan pengumpulan data kegiatan sensus dan survei. Pengembangan sistem aplikasi berbasis GIS juga perlu

ditingkatkan untuk memudahkan proses pengumpulan data lapangan dan pengerjaan peta digital agar lebih efisien, akurat, dan tepat guna.

- 5) Penguatan statistik sektoral khususnya terkait pembinaan dan sosialisasi Satu Data Indonesia sampai ke daerah.
- 6) Perlunya mengimplementasikan manajemen perubahan dan manajemen risiko secara lebih detail.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perbandingan Capaian Kinerja Total Tahun 2022 sampai dengan T-4 (2018)

2022		2018			2019			2020			2021			2022		
Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Tujuan 1 : Terselenggaranya kegiatan sensus dan survei yang menerapkan metodologi yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas																
Tersedianya metodologi sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas	Persentase metodologi sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas	51	51	100	45	50	111,11	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Tersedianya kerangka sampel yang akurat untuk menghasilkan daftar sampel unit analisis yang tepat sasaran	Persentase dokumen kerangka sampel yang akurat untuk menghasilkan daftar sampel unit analisis yang tepat sasaran	47	55	117,02	46	53	115,22	47	59	125,53	100	105,88	105,88	100	100	100

2022		2018			2019			2020			2021			2022		
Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Tersedianya standar data dan klasifikasi statistik sebagai rujukan bagi produsen data	Jumlah publikasi/laporan standar data dan klasifikasi statistik sebagai rujukan bagi produsen data	5	5	100	4	4	100	5	6	120	4	4	100	6	6	100
Tersedianya master dan peta wilayah kerja statistik yang mutakhir dan berkualitas	Persentase master dan peta wilayah kerja statistik yang mutakhir dan berkualitas							100	100	100	100	100	100	100	100	100
Tujuan 2 : Mewujudkan kemandirian penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral dalam bidang metodologi sensus dan survei bagi produsen data																
Terwujudnya pembinaan kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei	Persentase permintaan pembinaan kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei yang dilayani							75	158	210,67	100	100	100	100	100	100

2022		2018			2019			2020			2021			2022		
Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Terwujudnya kerja sama kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei	Persentase permintaan kerja sama kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei yang dilayani										100	100	100	100	100	100

Lampiran 2. Realisasi Kinerja per IKU dari Tahun 2022 sampai dengan Tahun Pertama Periode Renstra (2020)

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Renstra 2020	Realisasi 2022	Capaian (%)
Tujuan 1 : Terselenggaranya kegiatan sensus dan survei yang menerapkan metodologi yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas				
Tersedianya metodologi sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas	Persentase metodologi sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas	100,00	100,00	100,00
Tersedianya kerangka sampel yang akurat untuk menghasilkan daftar sampel unit analisis yang tepat sasaran	Persentase dokumen kerangka sampel yang akurat untuk menghasilkan daftar sampel unit analisis yang tepat sasaran	47 dokumen	60 dokumen (100%)	127,66
Tersedianya standar data dan klasifikasi statistik sebagai rujukan bagi produsen data	Jumlah publikasi/laporan standar data dan klasifikasi statistik sebagai rujukan bagi produsen data	4,00	6,00	150,00
Tersedianya master dan peta wilayah kerja statistik yang mutakhir dan berkualitas	Persentase master dan peta wilayah kerja statistik yang mutakhir dan berkualitas	100,00	100,00	100,00
Tujuan 2 : Mewujudkan kemandirian penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral dalam bidang metodologi sensus dan survei bagi produsen data				
Terwujudnya pembinaan kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei	Persentase permintaan pembinaan kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei yang dilayani	75,00	100,00	133,33
Terwujudnya kerja sama kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei	Persentase permintaan kerja sama kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei yang dilayani	75,00	100,00	133,33

Lampiran 3. Realisasi Kinerja per IKU Tahun 2022 terhadap Target Renstra Tahun 2022

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Renstra 2022	Realisasi 2022	Capaian (%)
Tujuan 1 : Terselenggaranya kegiatan sensus dan survei yang menerapkan metodologi yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas				
Tersedianya metodologi sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas	Persentase metodologi sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas	100,00	100,00	100,00
Tersedianya kerangka sampel yang akurat untuk menghasilkan daftar sampel unit analisis yang tepat sasaran	Persentase dokumen kerangka sampel yang akurat untuk menghasilkan daftar sampel unit analisis yang tepat sasaran	100,00	100,00	100,00
Tersedianya standar data dan klasifikasi statistik sebagai rujukan bagi produsen data	Jumlah publikasi/laporan standar data dan klasifikasi statistik sebagai rujukan bagi produsen data	6,00	6,00	100,00
Tersedianya master dan peta wilayah kerja statistik yang mutakhir dan berkualitas	Persentase master dan peta wilayah kerja statistik yang mutakhir dan berkualitas	100,00	100,00	100,00
Tujuan 2 : Mewujudkan kemandirian penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral dalam bidang metodologi sensus dan survei bagi produsen data				
Terwujudnya pembinaan kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei	Persentase permintaan pembinaan kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei yang dilayani	100,00	100,00	100,00
Terwujudnya kerja sama kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei	Persentase permintaan kerja sama kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei yang dilayani	100,00	100,00	100,00

Lampiran 4. Realisasi Kinerja per IKU Tahun 2022 terhadap Target Akhir Renstra 2024

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Renstra 2024	Realisasi 2022	Capaian (%)
Tujuan 1 : Terselenggaranya kegiatan sensus dan survei yang menerapkan metodologi yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas				
Tersedianya metodologi sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas	Persentase metodologi sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas	100,00	100,00	100,00
Tersedianya kerangka sampel yang akurat untuk menghasilkan daftar sampel unit analisis yang tepat sasaran	Persentase dokumen kerangka sampel yang akurat untuk menghasilkan daftar sampel unit analisis yang tepat sasaran	100,00	100,00	100,00
Tersedianya standar data dan klasifikasi statistik sebagai rujukan bagi produsen data	Jumlah publikasi/laporan standar data dan klasifikasi statistik sebagai rujukan bagi produsen data	2,00	6,00	300,00
Tersedianya master dan peta wilayah kerja statistik yang mutakhir dan berkualitas	Persentase master dan peta wilayah kerja statistik yang mutakhir dan berkualitas	100,00	100,00	100,00
Tujuan 2 : Mewujudkan kemandirian penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral dalam bidang metodologi sensus dan survei bagi produsen data				
Terwujudnya pembinaan kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei	Persentase permintaan pembinaan kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei yang dilayani	100,00	100,00	100,00
Terwujudnya kerja sama kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei	Persentase permintaan kerja sama kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei yang dilayani	100,00	100,00	100,00

Lampiran 5. Rencana Strategis Tahun 2020-2024

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Instansi : Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei

Misi :

1. Menyediakan metodologi survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas baik dari segi desain sensus dan survei, kerangka sampel, standar data dan klasifikasi statistik, serta pemetaan wilayah kerja statistik untuk mendukung Sistem Statistik Nasional (SSN) dan Satu Data Indonesia (SDI).
2. Membina K/L/D/I dalam bidang metodologi sensus dan survei.

Tujuan	Sasaran/Uraian	Indikator	Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Kebijakan	Strategi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Terselenggaranya kegiatan sensus dan survei yang menerapkan metodologi yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas	Tersedianya metodologi survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas	Persentase metodologi sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien untuk menghasilkan data berkualitas	Penyediaan metodologi sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien untuk mewujudkan data statistik berkualitas.	Meningkatkan kualitas perencanaan metodologi sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien.
	Tersedianya kerangka sampel yang akurat untuk menghasilkan daftar sampel unit analisis yang tepat sasaran	Persentase dokumen kerangka sampel yang akurat untuk menghasilkan daftar sampel unit analisis yang tepat sasaran	Penyediaan daftar sampel unit analisis yang tepat sasaran	Meningkatkan kualitas kerangka sampel yang terintegrasi dengan informasi geospasial yang akurat. Meningkatkan penggunaan daftar induk dan kode referensi dalam kegiatan statistik di Indonesia.
	Tersedianya standar data dan klasifikasi statistik sebagai rujukan bagi produsen data	Jumlah publikasi/laporan standar data dan klasifikasi statistik sebagai rujukan bagi produsen data	Peningkatan penggunaan standar data dan klasifikasi statistik serta kode referensi di Indonesia	Meningkatkan penggunaan standar data, termasuk klasifikasi statistik, yang berkualitas dalam kegiatan statistik di Indonesia

	Tersedianya master dan peta wilayah kerja statistik yang mutakhir dan berkualitas	Persentase master dan peta wilayah kerja statistik yang mutakhir dan berkualitas	Penyediaan peta wilayah kerja statistik yang akurat	Meningkatkan kualitas kerangka sampel yang terintegrasi dengan informasi geospasial yang akurat
Mewujudkan kemandirian penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral dalam bidang metodologi sensus dan survei bagi produsen data	Terwujudnya pembinaan kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei	Persentase pembinaan kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei yang dilayani	Penyelenggaraan pembinaan dalam kegiatan statistik (baik dari segi desain sensus dan survei, kerangka sampel, standar data dan klasifikasi statistik, serta pemetaan wilayah kerja statistik)	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan pembinaan dalam kegiatan statistik dengan K/L/D/I dalam bidang metodologi sensus dan survei untuk membangun Satu Data Indonesia. - Mengembangkan sistem/aplikasi untuk mendukung penguatan metodologi sensus dan survei di lingkungan Direktorat PMSS guna peningkatan efektifitas dan efisiensi kerja serta dapat meningkatkan pelayanan bagi pengguna data dan penyelenggara kegiatan statistik; - Meningkatkan sistem kerja melalui kebijakan reward and punishment dalam rangka menciptakan penyelenggaraan statistik yang efektif dan efisien;
	Terwujudnya kerja sama kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei	Persentase permintaan kerja sama kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei yang dilayani	Penyelenggaraan kerja sama dalam kegiatan statistik (baik dari segi desain sensus dan survei, kerangka sampel, standar data dan klasifikasi statistik, serta pemetaan wilayah kerja statistik)	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan kerja sama dalam kegiatan statistik dengan K/L/D/I dalam bidang metodologi sensus dan survei untuk membangun Satu Data Indonesia. - Meningkatkan koordinasi antar kedeputan, direktorat, dan daerah dalam perencanaan sensus dan survei; dan - Meningkatkan penerapan proses bisnis penyelenggaraan kegiatan statistik yang sesuai dengan Generic Statistical Business Process Model (GSBPM).

Lampiran 6. Metadata Indikator Kinerja Utama Direktorat PMSS

METADATA INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT PMSS 2020-2024

INDIKATOR 1.1.	KONSEP DAN DEFINISI
Persentase metodologi sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien menghasilkan data berkualitas (%)	Indikator ini menggambarkan kinerja PMSS dalam menghasilkan desain sensus dan survei serta ukuran sampel minimum yang andal, efektif, dan efisien. Desain sensus dan survei yang andal, efektif, dan efisien merupakan rancangan sensus dan survei yang tepat dan mampu memotret fenomena pada suatu domain sehingga hasilnya dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang tepat
	METODE PENGHITUNGAN
	Cara Perhitungan: 50% (Jumlah desain sensus dan survei yang dihasilkan oleh PMSS / jumlah permintaan desain × 100) + 50% (Jumlah penghitungan ukuran sampel minimum yang dihasilkan / jumlah permintaan penghitungan ukuran sampel minimum × 100) Rumus: $I_1 = \left[\left(50\% \times \frac{D}{D_R} \right) + \left(50\% \times \frac{S}{S_R} \right) \right] \times 100\%$ Keterangan: D= Desain sensus dan survei yang dihasilkan D _R = Desain sensus dan survei yang diminta S= Ukuran sampel minimum yang dihasilkan S _R = Ukuran sampel minimum yang diminta
	MANFAAT
	Mengukur tingkat penyediaan desain sensus dan survei dalam upaya mendukung SSN dan mengetahui tingkat penyekenggaraan sensus dan survei dalam penerapan GSBPM
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
	Jumlah naskah desain survei, tabel ukuran sampe minimuml, dokumen permintaan rancangan desain, dan ukuran sampel minimum suatu survei.
	DISAGREGASI
	Pusat (PMSS)
	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
Tahunan	

INDIKATOR 1.2.	KONSEP DAN DEFINISI
Persentase dokumen kerangka sampel yang akurat untuk menghasilkan daftar sampel unit analisis yang tepat sasaran	Indikator menggambarkan kinerja PMSS dalam menyediakan kerangka sampel yang akurat pada survei yang menerapkan probability sampling. Kerangka sampel yang akurat merupakan daftar unit populasi yang lengkap dan mutakhir.
	METODE PENGHITUNGAN
	Cara Perhitungan : Jumlah dokumen kerangka sampel yang dimutakhirkan/ Jumlah permintaan dokumen kerangka sampel × 100 %
	Rumus:
	$I_2 = \left[\left(\frac{d}{d_R} \times 100\% \right) \right]$
	Keterangan: <i>d</i> = Dokumen kerangka sampel yang dimutakhirkan <i>d_R</i> = Dokumen kerangka sampel yang diminta
	MANFAAT
	Mengukur penyediaan kerangka sampel untuk survei yang menerapkan probability sampling
	SUMBER DAN CAR PENGUMPULAN DATA
	Daftar sampel survei, dokumen kerangka sampel
	DISAGREGASI
	Pusat (PMSS)
FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA	
Tahunan	

INDIKATOR 1.3.	KONSEP DAN DEFINISI
Jumlah publikasi/laporan standar data dan klasifikasi statistik sebagai rujukan bagi produsen data	BPS (PMSS) sebagai pembina data wajib menyediakan standar data (konsep, definisi, klasifikasi, ukuran, dan satuan) yang bersifat lintas instansi. Pengembangan klasifikasi dapat dibuat sebagai pengembangan terpisah.
	METODE PENGHITUNGAN
	<p>Cara Perhitungan :</p> <p>Jumlah publikasi/laporan yang diterbitkan baik dengan kerangka regulasi maupun tidak</p> <p>Rumus:</p> $I_3 = \sum p$ <p>Keterangan:</p> <p>p = Publikasi/laporan yang diterbitkan baik dengan kerangka regulasi maupun tidak</p>
	MANFAAT
	Menjaga keterpaduan dan keterbandingan data yang dihasilkan produsen data baik internal maupun eksternal BPS
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
	Publikasi resmi standar data statistik dan publikasi resmi klasifikasi statistic
	DISAGREGASI
	Pusat (PMSS)
	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
	Berkala

INDIKATOR 1.4.	KONSEP DAN DEFINISI
<p>Persentase master dan peta wilayah kerja statistik yang mutakhir dan berkualitas</p>	<p>Indikator ini menggambarkan kinerja PMSS dalam menyediakan master dan peta wilayah kerja statistik yang mutakhir dan berkualitas. Master dan peta yang mutakhir mencakup jumlah wilayah yang mutakhir berdasarkan Perka Kode dan Nama Wilayah Kerja Statistik kondisi terkini, sedangkan kualitas mencakup perbaikan batas dan akurasi peta wilkerstat.</p>
	METODE PENGHITUNGAN
	<p>Cara Perhitungan:</p> <p>50% (Jml master wilkerstat diupdate/jml pemutakhiran wilkerstat yang dilaporkan x 100) ditambah 50%x (Jml peta yang diupdate/jml master wilkerstat yang diupdate x 100)</p> <p>Rumus:</p> $I_4 = \left[\left(50\% \times \frac{JW_u}{JW_l} \right) + \left(50\% \times \frac{JP_u}{JP_l} \right) \right] \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>JW_u = Jumlah master Wilkerstat yang diupdate</p> <p>JW_l = Jumlah pemutakhiran wilkerstat yang dilaporkan</p> <p>JP_u = Jumlah peta yang diupdate</p>
	MANFAAT
	<p>Mengukur tingkat penyediaan master dan peta wilayah kerja statistik yang mutakhir dan berkualitas untuk mendukung kegiatan sensus dan survei, serta menjaga kesesuaian antara master wilkerstat dan petanya.</p>
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
	<p>Master wilayah kerja statistik yang dimutakhirkan melalui sistem pemutakhiran MFD dan MBS. Peta yang dimutakhirkan baik secara pemutakhiran kuantitas (mengikuti pemutakhiran wilayah) dan kualitas</p>
	DISAGREGASI
	PMSS
	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
Tahunan	

INDIKATOR 2.1.	KONSEP DAN DEFINISI
<p>Persentase permintaan pembinaan kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei yang dilayani.</p>	<p>Indikator ini menggambarkan pembinaan dalam bidang metodologi sensus dan survei yang telah dilakukan oleh Direktorat PMSS baik dari aspek desain sensus dan survei, kerangka sampel, standar data dan klasifikasi statistik, serta pemetaan. Pembinaan yang dilakukan dapat berupa konsultasi dan pemberian rekomendasi metodologi (<i>technical assistance</i>).</p>
	METODE PENGHITUNGAN
	<p>Cara Perhitungan:</p> <p>(Jumlah permintaan pembinaan bidang metodologi sensus dan survei yang dilayani / jumlah total permintaan pembinaan) x 100%.</p> <p>Rumus:</p> $I_{5.1} = \left(\frac{p^*}{\sum p} \right) \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>p^* = permintaan pembinaan yang dilayani</p> <p>p = total permintaan pembinaan</p>
	MANFAAT
	<p>Mengetahui banyaknya produsen data yang akan menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan SSN dan SDI. Indikator ini dapat digunakan dalam perencanaan kegiatan pembinaan metodologi sensus dan survei bagi K/L/D/I.</p>
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
	<ul style="list-style-type: none"> - surat undangan, - surat permintaan koordinasi
	DISAGREGASI
	Pusat (PMSS)
	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
	Tahunan

INDIKATOR 2.2.	KONSEP DAN DEFINISI
<p>Persentase permintaan kerja sama kegiatan statistik dalam bidang metodologi sensus dan survei yang dilayani</p>	<p>Indikator ini menggambarkan permintaan kerja sama dalam bidang metodologi sensus dan survei yang telah dilakukan oleh Direktorat PMSS baik dari aspek desain sensus dan survei, kerangka sampel, standar data dan klasifikasi statistik, serta pemetaan. Kerja sama yang dilakukan dapat berupa penyusunan metodologi sampling survei, cakupan klasifikasi, dan standar data statistik yang akan digunakan.</p>
	METODE PENGHITUNGAN
	<p>Cara Perhitungan:</p> <p>(Jumlah permintaan kerja sama yang dilayani / Jumlah total permintaan kerja sama) x 100%.</p> <p>Rumus:</p> $I_{5.2} = \left(\frac{p^*}{\sum p} \right) \times 100\%$ <p>Keterangan:</p> <p>p^* = permintaan kerja sama yang dilayani</p> <p>p = permintaan kerja sama</p>
	MANFAAT
	<p>Mengetahui banyaknya produsen data yang akan menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan SSN dan SDI. Indikator ini dapat digunakan dalam perencanaan kegiatan pembinaan metodologi sensus dan survei bagi K/L/D/I.</p>
	SUMBER DAN CARA PENGUMPULAN DATA
	<p>- surat undangan,</p> <p>- surat permintaan kerjasama,</p>
	DISAGREGASI
	Pusat (PMSS)
	FREKUENSI WAKTU PENGUMPULAN DATA
	Tahunan

Lampiran 7. Jumlah Sumber Daya Manusia Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei Menurut Jabatan dan Jenjang Pendidikan (Kondisi Desember 2022)

**JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN METODOLOGI SENSUS DAN SURVEI
MENURUT JABATAN DAN JENJANG PENDIDIKAN
(KONDISI DESEMBER 2022)**

No	Jabatan	Jenjang Pendidikan					Jumlah
		S3	S2	S1/DIV	DIII	SLTA	
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>	<i>(8)</i>
1	Direktur	1	-	-	-	-	1
2	Statistisi Ahli Utama	1	-	-	-	-	1
3	Statistisi Ahli Madya	1	6	1	-	-	8
4	Statistisi Ahli Muda	1	20	3		-	24
5	Statistisi Ahli Pertama	-	-	21	-	-	21
6	Pranata Komputer Ahli Muda	-	-	1	-	-	1
7	Pranata Komputer Ahli Pertama	-	-	8	-	-	8
8	Staf	-	3	2	2	3	10
Jumlah		4	29	36	2	3	74

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. Dr. Sutomo 6-8 Jakarta 10710

Telp (62-21) 3841195, 3842508, 3810291

Faks (62-21) 3857046

Email: bpshq@bps.go.id